

**EVALUASI PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4IP)
TAHUN ANGGARAN 2013 DI KOTA MEDAN**

TESIS

OLEH :

**NURWINO
NIM. 131801026**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADIMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

**EVALUASI PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4IP)
TAHUN ANGGARAN 2013 DI KOTA MEDAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi
Publik dalam Program Studi Magister Administrasi Publik pada Program
Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH:

**NURWINO
NPM. 131801026**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADIMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

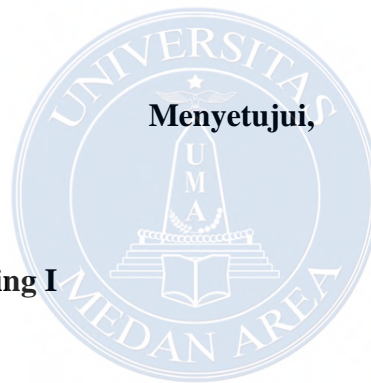
**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Evaluasi Program Percepatan Dan Perluasan Pembangunan
Infrastruktur Permukiman (P4IP) Tahun Anggaran 2013 Di
Kota Medan**

Nama : Nurwino

NIM : 131801026



Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Warjio, MA

Drs. Kariono, MA

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Direktur

Dr. Warjio, MA

Prof. Dr.Ir. Retna Astuti K, MS

Telah diuji pada Tanggal 11 Januari 2016

Nama : Nurwino

N P M : 131801026



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Drs. Usman Tarigan, MS

Sekretaris : Isnaini, SH, MHum

Penguji I : Dr. Warjio, MA

Penguji II : Drs. Kariono, MA

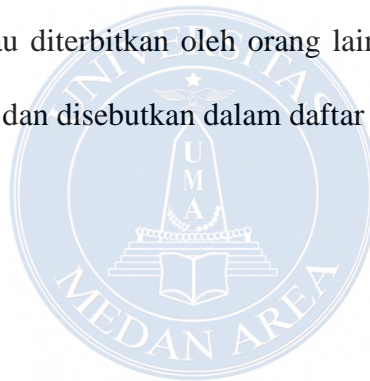
Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurwino
N P M : 131801026

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, Januari 2016

MATERAI

Rp. 6000

NURWINO

ABSTRAKSI

EVALUASI PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4IP) TAHUN ANGGARAN 2013 DI KOTA MEDAN

Nama : Nurwino
NIM : 131801026
Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Warjio, MA
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

Salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan adalah dengan mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan melalui pendekatan pembangunan yang berbasis masyarakat. Sebagai wujud komitmen terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah pada tahun 2013 pemerintah melalui kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP). Program ini merupakan program pendukung PNPM Mandiri Perkotaan sebagai upaya mengurangi beban hidup masyarakat miskin akibat perubahan besaran subsidi BBM. Anggaran P4IP tersebut berasal dari penghematan atau pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga yang dihimpun Pemerintah dimaksudkan untuk menanggulangi keterbatasan infrastruktur dasar agar mampu secara optimal melaksanakan usaha dan roda perekonomian akibat buruknya infrastruktur dasar sebagai sarana penunjang kelancaran ekonomi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi pengelolaan P4IP di Kota Medan pada tahun anggaran 2013. Sampel penelitian ini adalah pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan P4IP dari unsur Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), lurah, relawan dan konsultan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Medan sebanyak 66 orang sebagai representasi pengelola kegiatan terkait, dengan tidak mengambil seluruh populasi sebagai objek penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif guna mengetahui implementasi kegiatan P4IP di Kota Medan tahun anggaran 2013.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari keenam indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi program, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas dan ketepatan menunjukkan skor rata-rata dalam kondisi cukup atau sedang (71,94). Namun apabila dilihat dari masing-masing indikator menunjukkan bahwa satu indikator yaitu efisiensi yang termasuk kategori kurang, satu indikator menunjukkan kategori baik yaitu ketepatan dan keempat indikator lainnya termasuk dalam kategori cukup. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan P4IP di Kota Medan pada tahun anggaran 2013 termasuk dalam kategori cukup atau sedang dan dasar kebijakan P4IP dapat diimplementasikan.

Kata Kunci : Evaluasi, Pengelolaan P4IP, Penanggulangan Kemiskinan

ABSTRACT

EVALUATION PROGRAM ACCELERATION AND EXTENSION OF SETTLEMENT INFRASTRUCTURE FISCAL YEAR 2013 IN MEDAN

Name : Nurwino
NIM : 131801026
Program : Master of Public Administration
Preceptor I : Dr. Warjio, MA
Preceptor II : Drs. Kariono, MA

One of the government efforts to accelerate poverty reduction is to launched the National Program for Community Empowerment Urban through community-based development approach. As a commitment to poverty reduction efforts at the regional level by the year 2013 the government through the Ministry of Public Works launched the Program for the Acceleration and Expansion of Infrastructure Development of Settlements. The program is a support National Program for Community Empowerment Urban as an effort to reduce the burden of the poor as a result of changes in the amount of subsidies. Program for the Acceleration and Expansion of Infrastructure Development of Settlements budget comes from savings or budget cuts Ministry / Agency compiled the Government intended to overcome the limitations of basic infrastructure to be able to optimally carry out the business and the economy as a result of poor basic infrastructure as a means of supporting the smooth running of the local economy

This study aims to determine the realization of Program for the Acceleration and Expansion of Infrastructure Development of Settlements management in the city of Medan in fiscal year 2013. The study sample was actors involved in the implementation of elements of the Program is Community Self-Reliance Agency, Community Self-Help Groups, Lurah, volunteers and consultants of National Program for Community Empowerment Urban in the City of Medan as many as 66 people as a representation of the management related activities, by not taking the entire population as an object of research. The data were analyzed using descriptive method to determine the implementation of Program for the Acceleration and Expansion of Infrastructure Development of Settlements in Medan year 2013 budget.

The results showed that on the whole of the six indicators used to measure the implementation of the program, namely the effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy showed an average score under conditions sufficient or moderate (71.94). However, when viewed from each of the indicators show that the indicators of efficiency, including category less, a good indicator shows that the accuracy categories and four other indicators included in the category enough. It can be concluded that the implementation of Program for the Acceleration and Expansion of Infrastructure Development of Settlements in the City of Medan in fiscal year 2013 included in the category enough or moderate and basic of Program for the Acceleration and Expansion of Infrastructure Development of Settlements policies can be implemented.

Keywords: Evaluation, Management of Program for the Acceleration and Expansion of Infrastructure Development of Settlements, Poverty Reduction.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul tesis ini adalah “Evaluasi Program Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tahun Anggaran 2013 di Kota Medan”. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu segala saran dan kritik dari pembaca guna menyempurnakan tesis ini sangat penulis harapkan sehingga tesis ini semakin sempurna untuk dijadikan suatu informasi pengetahuan.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membimbing penulisan ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Yakub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, sekaligus pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.

4. Bapak Drs. Kariono, MA, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
6. Bapak M. Bajang Ahmadi selaku Team Leader PNPM Mandiri Perkotaan KMW Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu responden penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu dan berkontribusi dalam memberikan data dan informasi dalam proses penelitian ini.

Terima kasih pula kepada kedua orangtua, istri dan anak-anak, serta keluarga yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta do'a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis. Dan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang ikut memberi saran dan masukan dalam penyusunan tesis ini, semoga budi baik mereka menjadi amal sholeh di hadapan Allah SWT dan berkontribusi dalam perbaikan kualitas bangsa ini, Aamiin.

Medan, Januari 2016

Penulis,

Nurwino

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN	iii
ABSTRAKSI	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Hasil Penelitian	7
1.5. Kerangka Pemikiran	7
1.6. Hipotesis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Kebijakan Publik	12
2.1.1. Pengertian Kebijakan. Publik	12
2.1.2. Proses Kebijakan Publik	12
	ix

2.1.3. Evaluasi Kebijakan Publik	14
2.1.3.1. Pengertian Evaluasi Kebijakan	14
2.1.3.2. Tujuan Evaluasi Kebijakan	19
2.1.3.3. Fungsi Evaluasi Kebijakan	20
2.1.3.4. Kriteria Evaluasi Kebijakan	24
2.1.3.5. Pendekatan Evaluasi Kebijakan	27
2.2. Program Percepatan Dan Perluasan Pembangunan	
Infrastruktur Permukiman (P4IP)	29
2.2.1. Konsep dan Dasar Kebijakan	29
2.2.1.1. Tujuan P4IP	37
2.2.1.2. Komponen Kegiatan P4IP	37
2.2.1.3. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan P4IP	38
2.2.1.4. Lokasi Sasaran P4IP	38
2.2.1.5. Jenis Kegiatan Infrastruktur	39
2.2.1.6. Tahapan Pelaksanaan P4IP	39
2.2.1.7. Pembiayaan P4IP	41
2.2.2. Organisasi Pelaksana	41
2.2.2.1. Tata Peran Pelaku	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian	50
3.2. Lokasi Penelitian	52
3.3. Populasi dan Sampel	52
3.4. Teknik Pengumpulan Data	54

3.5. Operasionalisasi Variabel	55
3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	57
3.6.1. Teknik Pengolahan Data	57
3.6.2 Teknik Analisis Data	58
 BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Profil Kota Medan	61
4.1.1. Kependudukan Kota Medan	61
4.1.2. Visi dan Misi Kota Medan	64
4.2. Pelaksanaan P4IP di Kota Medan	69
4.2.1. Lokasi dan Alokasi P4IP di Kota Medan	70
4.2.2. Kegiatan Infrastruktur P4IP di Kota Medan	71
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
5.1. Hasil Penelitian	72
5.1.1. Karakteristik Responden	72
5.1.2. Profil Pemahaman Responden Terhadap P4IP	75
5.1.3. Variabel Penelitian	76
5.2. Analisis dan Interpretasi Data	115
5.2.1. Efektivitas	116
5.2.2. Efisiensi	117
5.2.3. Kecukupan	118
5.2.4. Kesamaan (Keadilan)	119
5.2.5. Responsivitas	121
5.2.6. Ketepatan	123

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	125
6.2. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA	132
-----------------------------	------------

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1. Lokasi dan Alokasi Program P4IP TA. 2013 Provinsi Sumatera Utara	3
Tabel 3.1. Komponen Populasi dan Sampel	53
Tabel 3.2. Skala Penilaian Untuk Pernyataan Positif dan Negatif	58
Tabel 4.1. Jumlah Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kota Medan Tahun 2008 – 2012	62
Tabel 4.2. Daftar Lokasi dan Alokasi P4IP Kota Medan	71
Tabel 5.1. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin	73
Tabel 5.2. Distribusi Responden Menurut Umur	73
Tabel 5.3. Distribusi Responden Menurut Pendidikan	74
Tabel 5.4. Distribusi Responden Menurut Kedudukan dalam P4IP ...	74
Tabel 5.5. Pertama kali Responden Mengetahui P4IP	75
Tabel 5.6. Hal yang pertama kali diketahui Responden terkait P4IP ..	76
Tabel 5.7. Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Terhadap P4IP.....	77
Tabel 5.8. Pengetahuan Responden Tentang Tujuan/Sasaran P4IP	78
Tabel 5.9. Pendapat Responden Tentang Tata Cara Pelaksanaan P4IP	79
Tabel 5.10. Pendapat Responden Tentang Pemahaman Aturan Dalam P4IP	80
Tabel 5.11. Pendapat Responden Tentang Tahapan dalam Pelaksanaan P4IP	80

Tabel 5.12.	Pendapat Responden Tentang Kesesuaian Kegiatan Infrastruktur Yang Dibangun Harus Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat dan PJM Pronangkis	81
Tabel 5.13.	Pendapat Responden Tentang Tingkat Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Yang Diterima terkait P4IP	81
Tabel 5.14.	Pendapat Responden Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dalam Pelaksanaan P4IP	82
Tabel 5.15.	Pendapat Responden Tentang Kualitas Rencana Kerja Yang Disusun	83
Tabel 5.16.	Pendapat Responden Tentang Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kerja Dalam P4IP	84
Tabel 5.17.	Pendapat Responden Tentang Keberadaan Saran Dan Prasarana Dalam Pelaksanaan P4IP	84
Tabel 5.18.	Pendapat Responden Tentang Kemampuan Kelompok Kerja Pada Pelaksanaan P4IP	85
Tabel 5.19.	Pendapat Responden Tentang Intensitas Coaching Dan Pelatihan yang Dilaksnakan Secara Formal dan Informal Oleh Konsultan Dalam Pengelolaan P4IP	86
Tabel 5.20.	Pendapat Responden Tentang Intensitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan P4IP	86
Tabel 5.21.	Pendapat Responden Tentang Rencana Anggaran Biaya Dalam Pelaksanaan P4IP	87
Tabel 5.22.	Pendapat Responden Tentang Tenaga Kerja Yang Digunakan dalam P4IP sesuai dengan RAB	87
Tabel 5.23.	Pendapat Responden Tentang Kesesuaian Biaya Yang Dipergunakan Dalam P4IP dengan Volume dan Jenis Kegiatan	88
Tabel 5.24.	Pendapat Responden Tentang Kesesuaian Penggunaan Waktu Penyelesaian Kegiatan dengan Waktu Yang Direncanakan	89
Tabel 5.25.	Pendapat Responden Tentang Pengaruh Konsultan/ Fasilitator Dalam Pelaksanaan P4IP di Kelurahan	89

Tabel 5.26.	Pendapat Responden Tentang Kesesuaian Infrastruktur Dasar yang Dibangun Dengan Prioritas Kebutuhan Masyarakat Yang Tertuang Dalam Rencana Tahunan Kelurahan	90
Tabel 5.27.	Pendapat Responden Tentang Hasil Pembangunan Infrastruktur Bermanfaat Bagi Masyarakat	91
Tabel 5.28.	Pendapat Responden Tentang Kecukupan Kebutuhan Infrastruktur Yang Dibangun bagi masyarakat	91
Tabel 5.29.	Pendapat Responden Tentang Pelibatan Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengambilan Keputusan	93
Tabel 5.30.	Pendapat Responden Tentang Hasil Pembangunan Infrastruktur Yang Bermanfaat bagi Masyarakat Miskin ...	93
Tabel 5.31.	Pendapat Responden Tentang Rasa Memiliki Oleh Warga Masyarakat Terhadap Hasil Kegiatan Infrastruktur Yang Telah Dibangun	94
Tabel 5.32.	Pendapat Responden Tentang Intensitas Pemanfaatan Dan Perawatan Hasil Pembangunan Infrastruktur	95
Tabel 5.33.	Pendapat Responden Tentang Dukungan Warga Masyarakat Terkait Pelaksanaan P4IP di Kelurahan	95
Tabel 5.34.	Pendapat Responden Tentang Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pengelolaan P4IP	96
Tabel 5.35.	Pendapat Responden Tentang Dukungan Swadaya Masyarakat Berupa Dana, Material dan Upah Kerja	97
Tabel 5.36.	Pendapat Responden Tentang Kepuasan Terkait Kebutuhan Warga Masyarakat Terhadap Hasil Pelaksanaan Infrastruktur	98
Tabel 5.37.	Pendapat Responden Tentang Tanggapan Dari Warga Masyarakat Terkait P4IP dari Segi Konsep Maupun Pengelolaan Program Di Masyarakat	99
Tabel 5.38.	Pendapat Responden Tentang Kelayakan Kelurahan Untuk Mengelola P4IP	100

Tabel 5.39.	Pendapat Responden Tentang Efektivitas Pengelolaan P4IP Yang Dilaksanakan Dengan Pola Swakelola dan Partisipatif Melalui Pemberdayaan Masyarakat	100
Tabel 5.40.	Pendapat Responden Tentang Tingkat Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur P4IP dalam Memberikan Kemudahan Akses Infrastruktur Masyarakat Terutama Warga Miskin	101
Tabel 5.41.	Pendapat Responden Tentang Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dalam Memulihkan Kesejahteraan Dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	102
Tabel 5.42.	Pendapat Responden Tentang Kesesuaian Lokasi Pembangunan Infrastruktur Dengan Kebutuhan Masyarakat Terutama Warga Miskin	103
Tabel 5.43.	Pendapat Responden Tentang Kemanfaatan Hasil Infrastruktur Yang Dibangun Minimal Hingga 5 Tahun Kedepan	104
Tabel 5.44.	Implementasi Pelaksanaan P4IP Di Kota Medan Tahun 2013	115

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1. Jadwal Pelaksanaan P4IP	3
Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran Penelitian	11
Gambar 2.1. Tahapan Pelaksanaan Program P4IP	39
Gambar 2.2. Bagan Alir Pencairan Dana BLM P4IP	41
Gambar 2.3. Struktur Organisasi Pengelolaan P4IP	42



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kegiatan Infrastruktur P4IP Kota Medan
- Lampiran 2. Kuesiner Penelitian
- Lampiran 3. Tabulasi Hasil Jawaban Kuesioner
- Lampiran 4. Tabulasi Hasil Wawancara
- Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan P4IP Kota Medan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan APBN 2013 memberikan alokasi yang cukup besar terhadap subsidi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) sekitar 193,8 Triliun atau 11,5 persen dialokasikan untuk subsidi BBM pada APBN 2013 yang mana lebih dari 50 persen subsidi BBM tersebut dinikmati oleh 20 persen orang-orang kategori mampu. Sementara hanya sekitar 2 persen dari APBN dinikmati oleh masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin yang dianggarkan untuk program-program perlindungan sosial berbasis rumah tangga seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). (Petunjuk Pelaksanaan P4IP, Dirjen Cipta Karya 2013).

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meluncurkan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) sebagai upaya mengurangi beban hidup masyarakat miskin akibat perubahan besaran subsidi BBM. Anggaran P4IP tersebut berasal dari penghematan atau pemotongan anggaran Kementrian/Lembaga yang dihimpun Pemerintah dimaksudkan untuk menanggulangi keterbatasan infrastruktur dasar agar mampu secara optimal melaksanakan usaha dan roda perekonomian akibat buruknya infrastruktur dasar sebagai sarana penunjang kelancaran ekonomi masyarakat. (Petunjuk Pelaksanaan P4IP, Dirjen Cipta Karya 2013).

Korten (1984) dalam Sutrisno (1995:80) mengatakan bahwa banyak program pembangunan yang tidak mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap program pengentasan penduduk miskin dan keterbelakangan, bahkan gagal mencapai tujuan program tersebut. Kendala yang sangat besar dalam pelayanan publik ialah adanya perbedaan sosial ekonomi antara masyarakat yang beragam dan kemampuan birokrasi pemerintahan. Karena itu, pemerintah dalam melakukan pelayanan publiknya harus memperhatikan kondisi lokal, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan kelompok sasaran masyarakat. Inti dasar pelayanan ini terletak pada proses kebijakan publik dan operasionalisasinya.

Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) dalam mendukung PNPM Mandiri Perkotaan dimaksudkan sebagai upaya memberikan kemudahan akses penyediaan infrastruktur permukiman, terutama bagi masyarakat miskin yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Melalui penyediaan infrastruktur Permukiman di Perkotaan tersebut diharapkan masyarakat miskin di wilayah sasaran dengan cepat dapat memulihkan kembali kondisi kesejahteraan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. (Petunjuk Pelaksanaan P4IP, Dirjen Cipta Karya 2013).

Lokasi sasaran P4IP ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 314/KPTS/M/2013 Tanggal 29 Juli tahun 2013 dengan jumlah lokasi 1.800 kelurahan/desa yang tersebar di 218 kota/kabupaten dan 33 provinsi secara nasional.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang melaksanakan Program P4IP di Perkotaan Tahun 2013 yang tersebar di 70 kelurahan, 32

kecamatan dan 12 kota/kabupaten, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1. Lokasi dan Alokasi Program P4IP TA. 2013 Prov. Sumatera Utara

NO	KOTA/KAB	JLH KEC.	JLH KEL.	NILAI BLM	DATA PODES 2011				DATA PPLS	% JIWA MISKIN
					LK	PR	PDDK	KK	PDDK MISKIN	
1.	Labuhan Batu	1	1	250.000.000	850	836	1.686	521	522	0,72
2.	Dairi	1	3	750.000.000	4.805	4.527	9.332	2.015	1.273	1,75
3.	Karo	1	5	1.250.000.000	20.648	21.278	41.926	10.201	2.851	3,93
4.	Deli Serdang	2	4	1.000.000.000	9.063	8.812	17.875	3.988	3.010	4,15
5.	Langkat	2	5	1.250.000.000	14.669	14.983	29.652	7.879	5.120	7,06
6.	Sibolga	4	5	1.250.000.000	13.854	13.465	27.319	6.266	5.851	8,06
7.	Tanjung Balai	2	7	1.750.000.000	21.205	20.491	41.696	9.858	8.406	11,58
8.	Pematangsiantar	5	12	3.000.000.000	28.585	30.067	58.652	17.339	7.907	10,90
9.	Tebing Tinggi	4	4	1.000.000.000	9.021	9.007	18.028	4.339	3.816	5,26
10.	Medan	3	8	2.000.000.000	64.879	62.172	127.051	28.476	27.266	37,57
11.	Binjai	4	11	2.750.000.000	36.072	37.384	73.456	16.299	5.160	7,11
12..	Padangsidimpuan	3	5	1.250.000.000	2.384	2.394	4.778	1.215	1.390	1,92
TOTAL		32	70	17.500.000.000	226.035	225.416	451.451	108.396	72.572	100

Sumber : Data Podes dan PPLS, BPS Tahun 2011

Pelaksanaan kegiatan P4IP dari tingkat Pusat sampai ke tingkat masyarakat di lokasi sasaran, dijadwalkan dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2013. Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1. Jadwal Pelaksanaan P4IP

No	Kegiatan	2013							
		Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
I	Persiapan tingkat Pusat								
1	Penyusunan Konsep & Pedoman	■	■	■					
2	Finalisasi dan Distribusi Pedoman & Juknis		■	■	■				
3	Sosialisasi ke Tingkat Pusat			■					
II	Pelaksanaan di Daerah								
5	Sosialisasi Program Tingkat Propinsi				■				
III	Pelaksanaan di Masyarakat								
6	Tahap Penyiapan dan Mobilisasi Masyarakat				■	■			
7	Tahap Perencanaan Partisipatif				■	■	■		
8	Tahap Pencairan BLM (40% ; 30% ; 30%)						■	■	■
9	Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat						■	■	■
10	Tahap Pemantaun dan Evaluasi	■	■	■	■	■	■	■	■

Sumber : Petunjuk Pelaksanaan P4IP TA. 2013-Dirjen Cipta Karya 2013

Penelitian ini menjadi penting sebagai contoh kajian program yang pengelolaannya berbasis pemberdayaan masyarakat untuk mendorong komitmen dan keberpihakan pemerintah dalam menetapkan kebijakan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dengan pola pembangunan partisipatif. Karena sangat berbeda pengelolaan program berbasis pemberdayaan masyarakat dengan program yang pengelolaannya tidak berbasis pemberdayaan masyarakat.

Alasan dipilihnya Kota Medan sebagai objek lokasi penelitian karena terdapat indikasi beberapa permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan P4IP di Kota Medan. Permasalahan-permasalahan dimaksud antara lain :

1. Paling banyaknya jumlah penduduk dan jumlah warga miskin di lokasi sasaran P4IP di Provinsi Sumatera Utara, sehingga paling mungkin memiliki keragaman dan dinamika yang lebih kompleks serta dapat menjadi representasi dari realitas pelaksanaan program pendukung PNPM Mandiri Perkotaan;
2. Penyelesaian kegiatan P4IP di Kota Medan mengalami keterlambatan hingga lebih dari satu bulan dari jadwal yang ditentukan.
3. Adanya indikasi penyalahgunaan BLM di beberapa lokasi, berakibat pada rendahnya kualitas infrastruktur dasar yang dibangun;
4. Lokasi kegiatan P4IP di Kota Medan ditetapkan langsung oleh Pusat, yang memungkinkan terjadinya ketidaktepatan sasaran program sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar bagi warga miskin;
5. Di beberapa lokasi, P4IP tidak dilaksanakan secara partisipatif.

Dari banyaknya masalah yang diidentifikasi seperti yang disebutkan sebelumnya seperti jumlah warga miskin, keterlambatan penyelesaian pembangunan infrastruktur, indikasi penyalahgunaan BLM yang berdampak pada kualitas pembangunan infrastruktur yang tidak maksimal dan ketepatan sasaran serta pola pembangunan yang tidak partisipatif, maka penulis beranggapan bahwa masalah-masalah tersebut layak diteliti. Setelah dilakukan analisis terkait dengan tingkat kerumitan dan intentitas yang berbeda terhadap fakta dan pijakan teori yang relevan maka penulis akan melakukan penelitian dengan batasan masalah hanya pada kriteria-kriteria evaluasi yang dijadikan sebagai indikator dalam menentukan keberhasilan P4IP di Kota Medan.

Dari pengalaman dan pengamatan penulis terdapat perbedaan yang jelas antara kenyataan yang ada dengan kondisi yang diharapkan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul :
“ Evaluasi Program Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4IP) Tahun Anggaran 2013 di Kota Medan ”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah P4IP telah dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan?
2. Apakah sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan P4IP di Kota Medan sudah efisien dan mampu mencapai hasil yang optimal?

3. Apakah tujuan pelaksanaan P4IP di Kota Medan telah tercapai dan dirasakan mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi?
4. Apakah sasaran P4IP berorientasi pada kesamaan (equity) antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat?
5. Apakah hasil P4IP di Kota Medan dapat memuaskan dalam pemenuhan kebutuhan dan mendapatkan respon dari masyarakat?
6. Apakah pelaksanaan P4IP di Kota Medan sudah tepat sasaran dan dapat memberikan dampak yang signifikan pada kelompok sasaran?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan P4IP di Kota Medan;
2. Untuk menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan P4IP di Kota Medan;
3. Untuk menganalisis kecukupan program P4IP di Kota Medan dalam memenuhi kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi;
4. Untuk menganalisis kesamaan (equity) yang diperoleh antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat pada pelaksanaan P4IP di Kota Medan;
5. Untuk menganalisis responsivitas dari masyarakat terkait keberhasilan P4IP di Kota Medan;

6. Untuk menganalisis ketepatan sasaran dan dampak yang signifikan pada kelompok sasaran dalam pelaksanaan program P4IP di Kota Medan.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai pelatihan intelektual, mengembangkan wawasan berfikir yang dilandasi konsep ilmiah khususnya mengenai evaluasi program;
2. Secara teoritis, akan diperoleh informasi empirik berdasarkan pijakan teori yang mendukung terhadap evaluasi program P4IP Tahun Anggaran 2013 di Kota Medan;
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dari kajian kriteria – kriteria evaluasi yang dijadikan sebagai indikator dalam menentukan keberhasilan P4IP Tahun Anggaran 2013 di Kota Medan sebagai upaya perbaikan ke depan;
4. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya untuk melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan pijakan teori yang telah dibuktikan secara ilmiah melalui prosedur penelitian ini.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang ditempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru (UU No. 25 Tahun 2000 tentang Proenas).

Saat ini beberapa kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan ditindaklanjuti dengan sumber dana dari kompensasi subsidi Bahan Bakar Minyak. Menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002:32) program pengentasan kemiskinan yang dijalankan mendapat kritik antara lain tentang transparansi program, dana yang kebanyakan tidak diterima oleh kelompok yang ditargetkan. Program tersebut masih merupakan kebijakan terpusat dan seragam yang memposisikan masyarakat sebagai objek dalam keseluruhan proses (Kementrian Kokesra, 2004:III-2).

Suharno (2010:187) mengungkapkan bahwa dalam implementasi kebijakan publik meski telah melalui tahap rekomendasi yang merupakan prosedur yang relatif kompleks, tidak selalu menjamin kebijakan tersebut dapat berhasil dalam penerapannya. Keberhasilan kebijakan publik sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya : pertimbangan pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan dan perilaku sasaran.

Mengikuti Willian Dunn (2003), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment). Evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan tersebut dapat dijadikan sebagai indikator dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

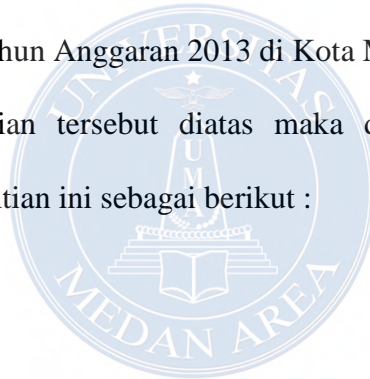
Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut :

1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya;
2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang umumnya diukur dari ongkos moneter;
3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang dapat menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Kesamaan (equity) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria ini penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;

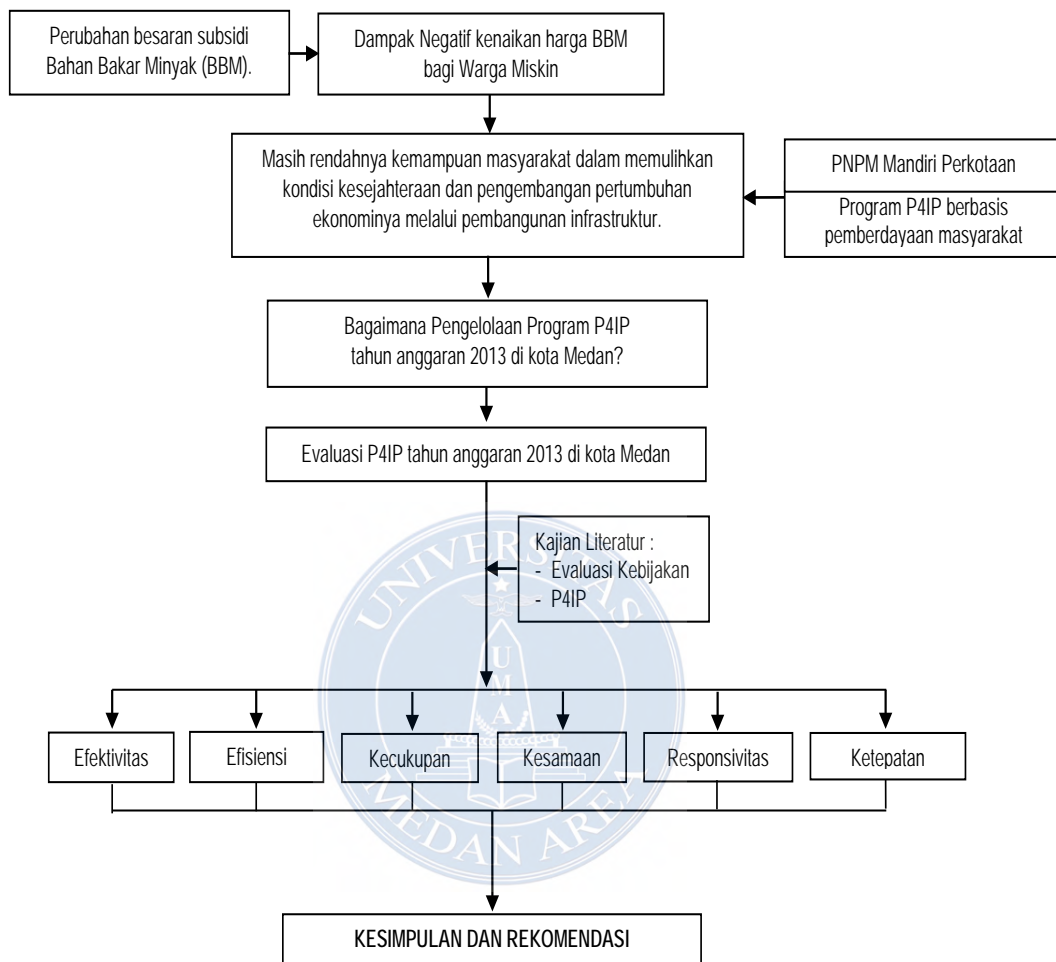
6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas penulis akan melakukan kajian dengan model kriteria-kriteria evaluasi menurut William Dunn (2013) terhadap evaluasi Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) Tahun Anggaran 2013 di Kota Medan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran Penelitian



1.6. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan. Berdasarkan pada permasalahan sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “ Keberhasilan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) Tahun Anggaran 2013 di Kota Medan dapat diukur dengan menggunakan kriteria-kriteria evaluasi sebagai indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas dan ketepatan”.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kebijakan Publik

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Riant Nugroho (2008:55) merumuskan defenisi kebijakan publik secara sederhana bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Dalam Budi Winarno (2007:30-31) kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sementara itu analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik.

2.1.2. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap

ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus bahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama;

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik;

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan;

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit

administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana;

5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yang memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini penulis membatasi dan hanya akan membahas tentang evaluasi kebijakan publik.

2.1.3. Evaluasi Kebijakan Publik

2.1.3.1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Pengertian evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penilaian; hasil. Menurut Bryan & White (1987), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana.

Menurut PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson, 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Sedangkan stufflebeam dalam Arikunto (2006 : 1) mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Menurut William N. Dunn (2003:608-610) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi

kebijakan lebih berkenan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis lainnya. Menurut Dunn (2003:608-609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya.

1. Fokus nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri;
2. Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi;
3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda

dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex-post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi (ex-ante);

4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan

meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Menurut Abidin (2006:211) evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Evaluasi awal, sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (ex-ante evaluation);
2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring;
3. Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (ex-post evaluation).

Abidin (2006:213) lebih lanjut mengemukakan bahwa informasi yang dihasilkan dari evaluasi merupakan nilai (values) yang antara lain berkenaan dengan :

1. Efisiensi (Efficiency), yakni perbandingan antara hasil dengan biaya, atau (hasil/biaya);
2. Keuntungan (profitability), yaitu selisih antara hasil dengan biaya atau (hasil/biaya);
3. Efektif (effectiveness), yakni penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan biaya;
4. Keadilan (equity), yakni keseimbangan (proporsional) dalam pembagian hasil (manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan);
5. Detriments, yakni indikator negatif dalam bidang sosial seperti kriminal;
6. Manfaat tambahan (marginal rate of return), yaitu tambahan hasil banding biaya atau pengorbanan (change-in benefits/change –in-cost).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu upaya untuk mengukur, menilai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam lingkup yang lebih umum atau keseluruhan dari tahapan kebijakan publik.

2.1.3.2. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Wibawa dkk (1994:9-10) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui 4 aspek yaitu :

1. Proses pembuatan kebijakan;
2. Proses implementasi;
3. Konsekuensi kebijakan;
4. Efektivitas dampak kebijakan.

Evaluasi terhadap aspek kedua disebut evaluasi implementasi sedangkan evaluasi terhadap aspek ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

Riant Nugroho, dalam premisnya mengemukakan bahwa setiap kebijakan harus dievaluasi sebelum diganti sehingga ada klausula “ dapat diganti setelah dilakukan evaluasi “ dalam setiap kebijakan publik. Hal ini perlu dijadikan acuan karena, pertama, untuk menghindari kebiasaan buruk administrasi publik di Indonesia yang sering menerapkan prinsip ganti pejabat, harus ganti peraturan. Kedua, supaya setiap kebijakan tidak diganti hanya karena keinginan atau selera pejabat yang saat itu berwenang (Nugroho, 2008:471). Terkait dengan hal tersebut tujuan evaluasi menurut Nugroho (2008:472) adalah bukan untuk menyalahkan pihak yang mengeluarkan kebijakan, namun untuk mengetahui kesenjangan antara

harapan dan pencapaian suatu kebijakan serta bagaimana menutup kesenjangan tersebut.

Menurut pendapat Marielle Berriet - Sollic, Pierre Labarthe, Catherine Laurent and Jacques Baudry dalam Makalah yang dipersiapkan untuk “Seminar 122 European Association of Agricultural Economist (EAAE) “ di Ancona, 17-18 Februari 2011 yang berjudul *Empirical validity of the evaluation of public policies: models of evaluation and quality of evidence*, mengatakan bahwa :

When an evaluation procedure is used to assess a public action programme, generally the goal is to produce the best iknowledge possible on the actual impact of the programme. The best knowledge should be a) based on relevant empirical evidence (which addresses the question at hand); b) corroborated by facts (facts which reflect real world observation and are empirical in nature) and c) reliable (knowledge produced using rigorous methods).

Pernyataan di atas memberikan pengertian bahwa ketika prosedur evaluasi digunakan untuk menilai pelaksanaan program kebijakan publik , umumnya tujuannya adalah untuk menghasilkan pengetahuan terbaik tentang dampak program yang sebenarnya. Pengetahuan "terbaik" seperti dimaksud di atas harusnya didasarkan pada bukti empiris yang relevan, diperkuat oleh fakta (fakta yang mencerminkan observasi dunia nyata dan empiris di alam) dan terpercaya dalam artian pengetahuan yang dihasilkan menggunakan metode yang ketat.

2.1.3.3. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Fungsi Evaluasi kebijakan publik menurut Nugroho (2011:463) memiliki empat fungsi, yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola-pola

hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang diamatinya. (1) Eksplanasi, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan; (2) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan; (3) Audit, Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai kekelompok saran kebijakan, atau ada kebocoran, atau penyimpangan; (4) Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut.

Selain hal tersebut diatas, fungsi dari evaluasi kebijakan publik menurut Putra (2003:93) ada tiga hal pokok, yaitu : (1) memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan; (2) untuk menilai kepasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi; dan (3) untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama segi metodologinya. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan dilakukan agar proses kebijakan secara keseluruhan dapat berlangsung secara baik.

Fungsi evaluasi menurut Agustino (2006:188-189) ada tiga macam yaitu :

1. Memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kebijakan;
2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target;
3. Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisiskebijakan lainnya, seperti perumusan masalah dan rekomendasi kebijakan.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan suatu program. Manfaat

positif akan diperoleh apabila evaluasi dijalankan dengan benar dan memperhatikan segenap aspek yang ada dalam suatu program. Menurut Dunn (2003:609-611) evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, yakni :

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik;
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, legal, sosial, substantif);
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada defenisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Menurut Samodra Wibawa (1994), evaluasi kebijakan publik memiliki 4 (empat) fungsi yaitu :

1. **Ekplanasi.** Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan;
2. **Kepatuhan.** Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan;
3. **Audit.** Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan;
4. **Akunting.** Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Sedangkan fungsi evaluasi menurut Agustino (2006:188-189) adalah :

1. Memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kebijakan;
2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target;
3. Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, seperti perumusan masalah dan rekomendasi kebijakan.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.

Menurut William N. Dunn fungsi evaluasi, yaitu : “Pertama, dan yang paling

penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi” (Dunn, 2003:609 dan 610).

2.1.3.4. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Kriteria-kriteria yang dirumuskan dapat dijadikan sebagai indikator dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut :

1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter;
2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;

3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Kesamaan (equity) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;
6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Chris. I. Nwagboso (Ph.D In-View) Assistant Lecturer Department of Political Science University of Calabar, Calabar P.M.B 1115, Unical Cross River State – Nigeria dalam “British Journal of

Humaniora dan Social Science” (April 2012, Vol. 5 (1) dengan judul **Public Policy and the Challenges of Policy Evaluation in Third World**, yang mengatakan bahwa :

Evaluation of public programmes leads to questions by the policy makers not only on whether the policy has succeeded in achieving the goal for which it was initiated and formulated or designed, but also assist in finding out from the target group how they perceive the programme or policy as well as various prognosis/strategies necessary to make the programme move viable.

Pernyataan diatas menyatakan bahwa evaluasi program publik mengarah pada pertanyaan kepada para pembuat kebijakan yang tidak hanya pada keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang dirumuskan atau dirancang, tetapi juga membantu dalam mencari informasi dari kelompok sasaran bagaimana mereka memandang program atau kebijakan serta berbagai strategi yang diperlukan untuk membuat program yang lebih layak.

Seanjutnya masih dalam Chris. I. Nwagboso (Ph.D In-View) Assistant Lecturer Department of Political Science University of Calabar, Calabar P.M.B 1115, Unical Cross River State – Nigeria dalam “British Journal of Humaniora dan Social Science” (April 2012, Vol. 5 (1) dengan judul Public **Policy and the Challenges of Policy Evaluation in Third World**, menyatakan bahwa :

In evaluating public programmes and policies, it is therefore, advisable that evaluators must adopt or use certain relevant indicators in such exercise. Thus, indicators are indication of a given situation (WHO, 1981:8). Therefore, the use of indicators will guide the investigator or policy maker to ascertain what should be measured, the criteria for such measurement and comparison of the phenomenon with other existing public programmes already implemented.

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa dalam mengevaluasi program dan kebijakan publik, disarankan agar "evaluator" diharuskan mengadopsi atau

menggunakan indikator tertentu yang relevan dalam pelaksanaannya. Indikator harus dapat memberikan indikasi dan refleksi dari situasi program yang dievaluasi (WHO, 1981: 8). Oleh karena itu, penggunaan indikator akan memandu peneliti atau pembuat kebijakan untuk memastikan apa yang harus diukur, kriteria untuk pengukuran tersebut dan perbandingan fenomena dengan program publik lainnya yang ada dan sudah dilaksanakan.

2.1.3.5. Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik memiliki pendekatan yang beragam tergantung tujuan ataupun sudut pandang dari para evaluator yang akan melakukan evaluasi.

Menurut Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, di dalam pelaksanaannya kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yaitu :

1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya;
3. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan berakhir, yang diarahkan untuk melihat

pencapaian program dalam mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) atau manfaat (dampak terhadap kebutuhan) program.

Dunn (2003:613-620) membagi pendekatan evaluasi menjadi tiga, yaitu :

1. Evaluasi Semu. Evaluasi semu (pseudo Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (self evident) atau tidak kontroversial;
2. Evaluasi Formal. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hal tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal dan merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program;
3. Evaluasi Keputusan Teoritis. Evaluasi ini merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil kebijakan yang

secara eksplisit dinilai oleh berbagai pelaku kebijakan. Asumsi evaluasi teoritis keputusan adalah tujuan dan sasaran dari perilaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal maupun tersembunyi merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan program.

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (ex-post evaluation) dengan pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi yang bertujuan untuk menilai keberhasilan program dengan indikator sesuai kriteria-kriteria kebijakan publik yang dipaparkan oleh Dunn dengan alasan sebagai berikut :

1. Tidak ada pilihan model yang terbaik, yang ada adalah pilihan yang harus kita pilih secara bijaksana sesuai dengan kebutuhan kebijakannya sendiri (Riant Nugroho, 2008:454);
2. Dalam penelitian ini fokus penelitian lebih tertuju pada kriteria-kriteria kebijakan publik yang dipergunakan sebagai indikator keberhasilan kebijakan yang lebih menekankan pada unsur-unsur pokok dalam sebuah evaluasi yakni efektivitas, Efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Sementara model yang paling detil membahas permasalahan ini adalah model William N Dunn.

2.2. Program Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP)

2.2.1. Konsep dan Dasar Kebijakan

Menurut Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM (2013:1) bahwa Kebijakan pemerintah untuk menyetatkan perekonomian dengan mengurangi subsidi Bahan

Bakar Minyak (BBM) berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, utamanya rumah tangga miskin dan rentan.

Tekait dengan penanggulangan kemiskinan menurut Muhammad Rusli dan Hamsinah dalam “International Journal of Sains and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064 Volume 3 Edisi 3”, Maret 2014 yang berjudul : ***Policy Evaluation Study on Subsidy Policy, Qualitative Basis, for Poverty Alleviation in Parepare, South Sulawesi***, menyatakan bahwa :

Poverty problem, as social problem may be analysed by policy and analysis, public policy, evaluation aspect of public policy in particular. The basic question is, that can be asked and raised, why the amount of the poor is relatively high even though the state has spent great substantial funds for poverty alleviation? Based on some study findings of public policy evaluations that the mechanism and distribution processes and inaccurate target are the main obstacles in achieving the goals of poverty reduction policies. This is one of the lacks and shortcomings of quantitative approach on the study of public policy evaluation that invite much attentions and critics as it only highlights how far is the output produced. Whereas, community participation is necessary for delivering the relief of poor people increasing their income. Participation is not only to wish or not wish, but the extent to which society benefits from such government assistance to improve their socio-economic life. This assumption is in line with the results of Roemingsih and Ariadi research (2005) that there were many recipients rejected the government aid as they did not feel its direct impact.

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa masalah kemiskinan, sebagai masalah sosial dapat dianalisa dengan analisis kebijakan, kebijakan publik, khususnya aspek evaluasi kebijakan publik. Pertanyaan mendasar yang dapat ditanyakan dan dibesarkan, mengapa jumlah orang miskin relatif tinggi meskipun negara telah menghabiskan dana yang besar untuk pengentasan kemiskinan?. Berdasarkan beberapa temuan dalam studi evaluasi kebijakan publik adalah mekanisme, proses distribusi dan ketidaktepatan sasaran adalah hambatan utama dalam mencapai tujuan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pendekatan pada

studi evaluasi kebijakan publik banyak mengundang perhatian dan kritik karena hanya menyoroti sejauh mana output yang dihasilkan. Sedangkan, partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatan mereka. Partisipasi sosial tidak hanya berharap atau tidak ingin, akan tetapi sejauhmana masyarakat dapat menerima manfaat dari bantuan pemerintah tersebut untuk meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi mereka. Asumsi ini sejalan dengan Hasil penelitian Roeminingsih dan Ariadi (2005) yang menyatakan bahwa ada banyak penerima manfaat menolak bantuan pemerintah karena tidak merasa sebagai penerima dampak langsung.

Menurut Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM (2013:35) P4IP merupakan bagian dari program kompensasi khusus yang berupa penyediaan infrastruktur permukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan sistem penyediaan air minum dan sumber daya air lainnya untuk desa nelayan, daerah rawan air, permukiman kumuh maupun wilayah miskin kota. Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar di perdesaan dan perkotaan serta meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat miskin dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut.

Terkait dengan subsidi BBM yang diberikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar, Seetanah B, Ramessur S dan Rojid S dalam "International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies" V6-2 (2009) yang berjudul : *Does Infrastruktur Alleviates Poverty In Developing*

Countries? Menyatakan bahwa :

Infrastructure has largely been ignored in the assessment of poverty in developing countries. This paper attempts to make some contribution in the establishing the ingredients to alleviate poverty by exploring the impact of infrastructure on the urban poor in sample of 20 developing countries, over the period 1980-2005.

Pernyataan diatas menyatakan bahwa infrastruktur sebagian besar telah diabaikan dalam penilaian kemiskinan di negara-negara berkembang. Menurut Seetanah B, Ramessur S dan Rojid S makalah tersebut mencoba untuk membuat beberapa kontribusi dalam membangun pemahaman untuk mengurangi kemiskinan dengan menjelajahi dampak infrastruktur pada masyarakat miskin perkotaan dengan sampel di 20 negara berkembang, selama periode 1980-2005.

Lebih lanjut Seetanah B, Ramessur S dan Rojid S mengatakan bahwa :

Current thinking on poverty alleviation has focused on the promotion of opportunity (access to resources, services, and productive employment), enhancing security (reducing vulnerability to shocks), and facilitating empowerment (increasing the participation of poor people in decision making) through access to transport infrastructure.

Many people, and not only transport planners, believe firmly that transport improvements alleviate poverty. However, with the exception of resettlement studies, few studies have been done to date on the impacts of urban transport infrastructure, on the poor in the context of developing countries. Moreover, as the World Bank Poverty Reduction Sourcebook (2001) puts it: "Little evidence exists on the direct impact and final incidence of net benefits of transport projects."

Most of the existing work on transport and poverty reduction has concerned roads, particularly rural roads and not much research has been done on poverty reduction impact of urban transport. It must also be noted that in most studies the role of transport infrastructure in reducing disparity across regions has been exploited in other words they have concentrated on the impact of transport on inequality rather than absolute poverty. Alongside, most of the existing studies have largely ignored model uncertainty altogether and led to overconfident inferences.

Dalam pernyataan diatas menyatakan bahwa pemikiran terkini tentang pengentasan kemiskinan telah difokuskan pada promosi kesempatan (akses ke

sumber daya, jasa, dan produktif kerja), meningkatkan keamanan (mengurangi kerentanan terhadap guncangan), dan memfasilitasi pemberdayaan (peningkatan partisipasi masyarakat miskin orang dalam pengambilan keputusan) melalui akses untuk mengangkat kebutuhan infrastruktur.

Banyak orang selain perencana infrastruktur bidang transportasi percaya dan tegas menyatakan bahwa perbaikan transportasi mengurangi kemiskinan.

Sebagian besar pekerjaan yang ada pada infrastruktur transportasi dan pengurangan kemiskinan memiliki keterkaitan, terutama jalan pedesaan dan tidak banyak penelitian dilakukan pada dampak pengurangan kemiskinan transportasi perkotaan. Hal ini seharusnya juga dicatat bahwa dalam kebanyakan studi peran infrastruktur transportasi dalam mengurangi disparitas antar daerah telah dimanfaatkan dan berkonsentrasi pada dampak ketimpangan transportasi dan bukan kemiskinan absolut.

selanjutnya Seetanah B, Ramessur S dan Rojid S. menegaskan bahwa :

To deal with problem of accessibility, subsidised provision of infrastructure is often proposed as a means of redistributing resources from higher income households to the poor. However its effectiveness depends on whether subsidies actually reach the poor (World Bank, 1994).

Maksud dari kutipan di atas adalah untuk mengatasi masalah aksesibilitas, pemberian subsidi bidang infrastruktur sering diusulkan sebagai sarana mendistribusikan sumber daya dari rumah tangga berpendapatan lebih tinggi kepada orang miskin. Namun yang lebih efektif tergantung pada apakah subsidi benar-benar mencapai sasaran kepada masyarakat miskin (Bank Dunia, 1994).

Penyelenggaraan P4IP ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan

memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara dan Lembaga. (Petunjuk Pelaksanaan P4IP, 2013:8)

Sesuai dengan road map PNPM Mandiri 2013–2014 yang disusun oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada pilar ke 1 yaitu integrasi program-program pemberdayaan masyarakat dimana arah kebijakan PNPM Mandiri mendorong kemitraan seluruh program pemberdayaan untuk bermitra dengan kelembagaan masyarakat yang telah ada di kelurahan/desa, salah satunya adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Penanggulangan kemiskinan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan mendorong kemitraan juga telah dilaksanakan di beberapa negara. Hal ini sejalan dengan Dokumen Kerja yang ditulis untuk Konferensi global ke-7 terkait Pemberdayaan Masyarakat dan promosi kesehatan dengan studi kasus di Asia Tenggara yang dilaksanakan di Nairobi, Kenya, 26-30 Oktober 2009.

Latar belakang makalah ditulis dan disusun oleh: Dr Glenn Laverack, Geneva. Studi kasus ditulis dan disusun oleh:

1. SEWA (Self Employed Woman Association) studi kasus:
 - a. Dr Davison Munodawafa, Kantor Regional WHO untuk wilayah Asia Tenggara, New Delhi, India. E-mail: munodawafad@searo.who.int
 - b. Prof Surinder Aggrawal
 - c. Ms Mirai Chatterjee.
2. ASHA (Accredited Social Health Activist) studi kasus:
 - a. Dr Thakur, JS WHO (World Health Organisation) Kantor Negara, India
 - b. Dr Srivastava, RK; Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemerintah India

Di dalam dokumen konferensi tersebut dinyatakan bahwa :

Community empowerment consists of two concepts: 'community' and 'empowerment'. Communities are groups of people that may or may not be spatially connected, but who share common interests, concerns or identities. Communities may be local, national, international or even global in nature and may have either specific or broad interests (Laverack, 2007). Empowerment in the broadest sense is '...the process by which disadvantaged people work together to increase control over events that determine their lives' (Werner, 1988). Most definitions of empowerment give the term a positive value (improves peoples circumstances) and embody the notion that it must come from within an individual or group and cannot be given to an individual or group.

Community empowerment includes personal (psychological) empowerment, organizational empowerment and broader social and political actions. Community empowerment is therefore both an individual and a group phenomenon. The conceptual roots of community empowerment come primarily from international development work (poor communities needed to become more powerful),

Pernyataan diatas memiliki pengertian bahwa pemberdayaan masyarakat terdiri dari dua konsep yaitu “Community” dan “empowerment”. Masyarakat adalah sekelompok orang yang mungkin terhubung atau tidak terhubung secara spasial, tetapi berbagi kepentingan dan keprihatinan bersama. Komunitasnya bisa saja lokal, nasional, internasional, bahkan global atau kepentingan yang lebih luas (Laverack, 2007). Pemberdayaan dalam arti yang luas adalah proses orang bekerja sama untuk meningkatkan kontrol atas peristiwa yang menentukan hidup mereka (Werner, 1988). Kebanyakan definisi pemberdayaan memberikan nilai positif seperti istilah meningkatkan keadaan masyarakat dan mewujudkan gagasan. Hal itu harus datang dari dalam individu atau kelompok dan tidak dapat diberikan kepada individu atau kelompok. Pemberdayaan masyarakat termasuk personal pemberdayaan, organisasi pemberdayaan, tindakan sosial dan politik yang lebih

luas. Akar konseptual pemberdayaan masyarakat berasal dari pembangunan internasional yang mewajibkan masyarakat miskin menjadi lebih berdaya.

Terkait dengan kemitraan yang mendukung pemberdayaan masyarakat, lebih lanjut disampaikan bahwa :

The purpose of partnerships is to allow community organisations to grow beyond their own local concerns and to take a stronger position on broader issues through networking and advocacy. The key empowerment issue is to remain focussed on the shared concern that brings the groups together and not on the individual needs or issues of the different groups in the partnership.

pernyataan diatas menyatakan bahwa tujuan kemitraan adalah untuk memungkinkan organisasi masyarakat untuk tumbuh melampaui mereka sendiri, keprihatinan lokal dan mengambil posisi yang lebih kuat pada isu-isu yang lebih luas melalui jaringan dan advokasi. Masalah utama pemberdayaan adalah tetap fokus pada keprihatinan bersama dan bersama membawa kelompok dan tidak pada kebutuhan atau masalah individu dari kelompok yang berbeda di kemitraan.

Masih dalam dokumen Konferensi global ke-7 terkait Pemberdayaan Masyarakat dan promosi kesehatan dengan studi kasus di Asia Tenggara yang dilaksanakan di Nairobi, Kenya, 26-30 Oktober 2009, para ahli menyatakan :

A key turning point in the empowerment of a community is when it stops focusing solely on its immediate needs and begins to address issues that have a broader concern. The process starts with a local problem that has been identified by the community

Pernyataan diatas mengandung pengertian bahwa sebuah titik balik dan merupakan kunci penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah ketika berhenti berfokus hanya pada kebutuhan mendesak dan mulai untuk mengatasi masalah

yang memiliki kepedulian yang lebih luas. Proses dimulai dengan masalah lokal yang telah diidentifikasi oleh masyarakat,

2.2.1.1. Tujuan P4IP

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan P4IP (2013:8) bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Memberikan kemudahan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar permukiman di perkotaan;
- b. Mendorong roda perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dengan adanya sarana dan prasarana infrastruktur yang baik.

2.2.1.2. Komponen Kegiatan P4IP

Komponen kegiatan P4IP sesuai dengan petunjuk pelaksanaan P4IP (2013:9) terdiri dari :

- a. Penguatan kapasitas masyarakat. Program ini mendukung dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memprioritaskan, merencanakan, melaksanakan, mengelola dan memantau pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar;
- b. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar 250 juta/kelurahan termasuk didalamnya untuk BOP BKM sebesar 5% dari pagu BLM;
- c. Komponen pendampingan, digunakan mendukung pelaksanaan program seperti pengadaan fasilitator dan askot berikut gaji dan BOP Tim Faskel dan BOP Satker PBL Propinsi untuk sosialisasi, koordinasi pengendalian pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi program. (Petunjuk Pelaksanaan P4IP, 2013:9).

2.2.1.3 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan P4IP

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan P4IP (2013:9) bahwa kelembagaan masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang didukung pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mampu mengelola kegiatan P4IP ini dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Partisipatif, dimana setiap tahapan proses kegiatan (perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban) P4IP melibatkan masyarakat sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat;
- b. Transparan dan Akuntabel, dimana dalam setiap tahapan kegiatan P4IP dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Sederhana dan Mudah Dikerjakan, artinya jenis kegiatan dan proses pelaksanaannya diupayakan semudah mungkin, sistematis dan bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan mengacu pada ketentuan;
- d. Berkualitas secara layak, agar pelaksanaan P4IP di Perkotaan ini tetap mengacu pada kualitas standar teknis pekerjaan umum (PU) dan petunjuk teknis pelaksanaan infrastruktur PNPM Mandiri Perkotaan.

2.2.1.4 Lokasi Sasaran P4IP

Lokasi sasaran ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 314/KPTS/M/2013 Tanggal 29 Juli tahun 2013 tentang Penetapan Kelurahan Sasaran Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) Tahun 2013 dengan jumlah 1.800 kelurahan yang tersebar di 218 kota/kabupaten dan 33 provinsi.

2.2.1.5 Jenis Kegiatan Infrastruktur

Jenis kegiatan yang dilaksanakan di P4IP ini adalah kegiatan infrastruktur yang dapat memberikan dampak manfaat langsung kepada masyarakat miskin tentang kebutuhan infrastruktur dasar permukiman yang meliputi :

1. Jalan dan Jembatan;
2. Tambatan Perahu;
3. Penyediaan Air Minum;
4. Sanitasi Lingkungan (Drainase, Saluran Limbah Rumah Tangga, MCK/Jamban dan Persampahan);
5. Irigasi;

Seluruh usulan kegiatan harus berdasarkan hasil perencanaan masyarakat yang tertuang dalam Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) atau Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM). (Petunjuk Pelaksanaan P4IP, 2013:8)

2.2.1.6 Tahapan Pelaksanaan P4IP

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan P4IP (2013:18), tahapan pelaksanaan kegiatan P4IP di masyarakat secara umum terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu : Sosialisasi Kegiatan P4IP , Review PJM dan Renta Pronangkis, pelaksanaan pembangunan serta Operasional dan Pemeliharaan sebagaimana tersaji pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1. Tahapan Pelaksanaan Program P4IP



1. Sosialisasi Kegiatan P4IP , tahapan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan program tingkat kelurahan/desa dengan tujuan untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang akan adanya kegiatan P4IP di kelurahan/desa tersebut. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dalam forum rembuk warga yang diakhiri dengan membangun komitmen bersama, menyepakati untuk mensukseskan P4IP yang dituangkan dalam berita acara Rembug Kesiapan Masyarakat;
2. Review PJM dan Renta Pronangkis, pada tahap ini BKM bersama masyarakat melakukan review PJM/Renta Pronangkis dan selanjutnya menyusun dan menyepakati bersama prioritas usulan kegiatan infrastruktur program P4IP. Berdasarkan hasil prioritas tersebut, KSM/Panitia menyusun proposal kegiatan. Proposal tersebut selanjutnya menjadi dokumen rencana kerja/perencanaan kegiatan KSM/panitia dan merupakan bukti dasar kesiapan pelaksanaan kegiatan oleh KSM/Panitia;
3. Pelaksanaan Pembangunan Fisik, kegiatan pelaksanaan ini merupakan pelaksanaan pembangunan fisik kegiatan P4IP, yang mencakup : tahap persiapan, pelaksanaan konstruksi termasuk Monitoring dan Evaluasi oleh masyarakat. Dengan adanya pemantauan masyarakat ini diharapkan adanya kepedulian masyarakat untuk memantau pelaksanaan P4IP secara berkala dan mandiri, sehingga proses dan hasil pelaksanaan sesuai ketentuan dan berkualitas baik. Adapun evaluasi disini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kualitas proses dan hasil pelaksanaan sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang sudah ditetapkan;

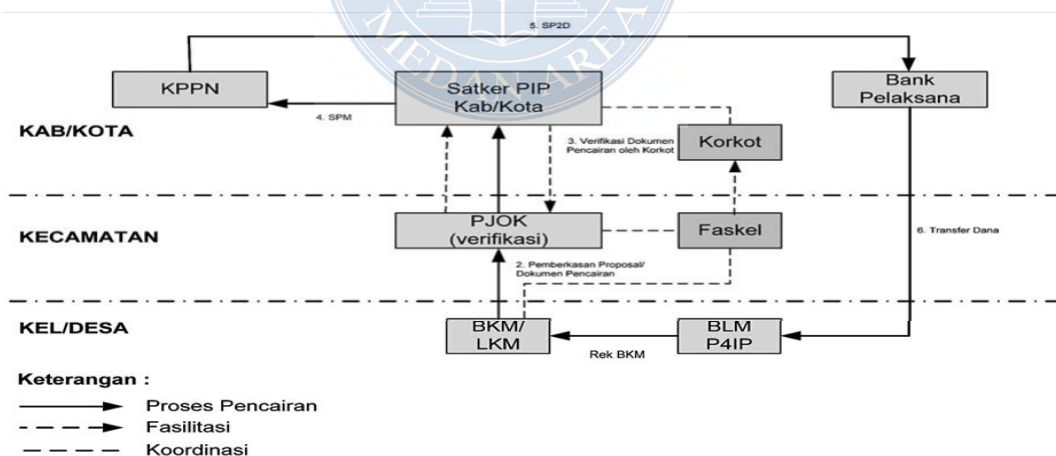
4. Operasi dan Pemeliharaan, kegiatan pada tahap ini pada dasarnya adalah merupakan kegiatan pemanfaatan prasarana yang sudah dibangun dan kegiatan pemeliharaannya oleh masyarakat.

2.2.1.7 Pembiayaan P4IP

Pembiayaan BLM dan bantuan teknis P4IP bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013.

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan P4IP (2013:19) Mekanisme pencairan dana BLM P4IP dilaksanakan melalui mekanisme yang dijelaskan pada gambar bagan alir dibawah ini :

Gambar 2.2. Bagan Alir Pencairan Dana BLM P4IP



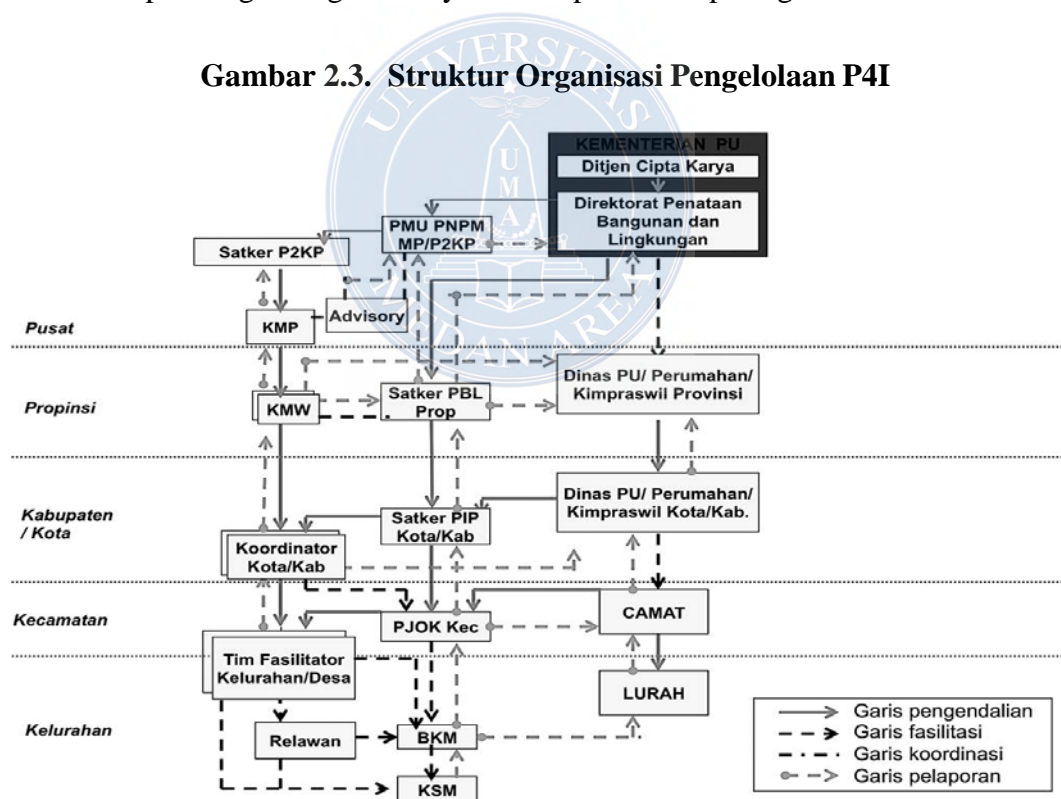
Sumber : Petunjuk Pelaksanaan P4IP, (2013:24)

2.2.2. Organisasi Pelaksana

Organisasi penyelenggaraan yang diuraikan adalah khusus organisasi penyelenggaraan PNPM Mandiri Perkotaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan P4IP di Perkotaan. (petunjuk pelaksanaan P4IP, 2013:26)

Dalam penyelenggaraan P4IP, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menugaskan Program Management Unit (PMU) PNPB Mandiri Perkotaan. PMU melalui Satuan Kerja P2KP menugaskan Konsultan Manajemen Pusat (KMP) dan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) untuk melaksanakan manajemen proyek secara menyeluruh. Di tiap kota/kabupaten difasilitasi Tim Koordinator Kota /Asisten Koordinator Kota Mandiri. (petunjuk pelaksanaan P4IP, 2013:26)

Secara rinci hubungan kerja antar unsur pelaksana kegiatan dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat masyarakat dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber : Petunjuk Pelaksanaan P4IP, (2013:26)

2.2.3. Tata Peran Pelaku

a. Tingkat Provinsi

Menurut petunjuk pelaksanaan P4IP (2013) pelaksana program di tingkat provinsi ditunjuk Satker PBL Provinsi dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan teknis dan administratif pelaksanaan P4IP;
2. Melakukan rekrutmen Askot Infrastruktur Mandiri dan Fasilitator;
3. Melakukan pembayaran gaji dan BOP Fasilitator;
4. Melaksanakan Sosialisasi dan Koordinasi tingkat Propinsi;
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan P4IP;
6. Mengelola tata pelaporan pelaksanaan P4IP;
7. Mempertanggungjawabkan pengeluaran dana sesuai ketentuan;
8. Menindaklanjuti pengaduan terkait P4IP sampai proses hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan.

c. Tingkat Kota

Menurut petunjuk pelaksanaan P4IP (2013) pelaksana di tingkat Kota ditunjuk Satker PIP Kota dengan tugas dan tanggungjawab :

1. Memfasilitasi koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan P4IP;
2. Menyalurkan dan mengadministrasikan dana BLM P4IP, terutama laporan SP2D dan e-monitoring pencairan dana BLM;
3. Melakukan pengendalian pemanfaatan dana BLM P4IP;
4. Menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait dengan P4IP sampai ke proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Memberikan pelaporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Tingkat Kecamatan

Pemerintah kecamatan, sesuai petunjuk pelaksanaan P4IP (2013) dalam hal ini adalah perangkat daerah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat, dengan tugasnya adalah:

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan P4IP di wilayah kerjanya;
2. Membina dan mengendalikan kegiatan P4IP di wilayah kerjanya;
3. Melakukan pembinaan kepada pemerintahan kelurahan dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Masih menurut petunjuk pelaksanaan P4IP (2013) unsur utama pelaksanaan P4IP di tingkat kecamatan adalah Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dengan peran dan tugas adalah :

1. Memantau pelaksanaan P4IP sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan;
2. Melaksanakan administrasi program berupa penandatanganan SPPB, menerbitkan Surat Perjanjian Pemanfaatan BLM dan menyampaikan dokumen pencairan kepada Satker PIP Kota;
3. Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas setiap bulan;
4. Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya;
5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan P4IP dengan Korkot/Askot Mandiri dan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan P4IP di wilayah kerjanya;

6. Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sesuai dengan usulan yang disetujui Fasilitator.

e. Tingkat Kelurahan

Di tingkat kelurahan, menurut petunjuk pelaksanaan P4IP (2013) unsur utama pelaksanaan P4IP adalah Lurah dan perangkatnya, BKM, KSM dan relawan masyarakat dengan peran dan tugas masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

1. Lurah

Secara umum peran Lurah adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan P4IP di wilayah kerjanya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Untuk itu Lurah dapat mengerahkan perangkat kelurahan sesuai dengan fungsi masing-masing.

Secara rinci tugas dan tanggung jawab Lurah dalam pelaksanaan P4IP adalah sebagai berikut:

- a. Membantu sosialisasi tingkat kelurahan ;
- b. Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan Korkot/Askot Mandiri/Tim Fasilitator dan relawan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan P4IP;
- c. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan P4IP;

- d. Berkoordinasi dengan Tim Fasilitator, relawan masyarakat dan BKM, memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta dan penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan P4IP.

2. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

BKM dalam pelaksanaan P4IP bertugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pencairan dana kepada KSM;
- b. Membuat Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L) dengan KSM selaku pelaksana kegiatan P4IP;
- c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul di kelurahan, termasuk memberikan sanksi kepada KSM atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan- ketentuan dalam SPPD-L.

1. Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dibentuk oleh BKM yang berperan mengkoordinasikan seluruh kegiatan, yakni:

- a. Memfasilitasi pembentukan Organisasi Pengelola Operasional & Pemanfaat (O&P);
- b. Meyelenggarakan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) bagi tim pelaksana yakni KSM termasuk praktek lapangan;
- c. Memverifikasi administrasi pencairan dan pemanfaatan dana kepada KSM;

- d. Memfasilitasi, mengawasi dan mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan KSM termasuk memberikan penguatan teknik konstruksi maupun administrasi kegiatan;
- e. Menyelenggarakan rapat evaluasi rutin bersama KSM untuk mengevaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mendorong upaya-upaya percepatan penyelesaian kegiatan lapangan;
- f. Bersama Fasilitator Teknik dan KSM melakukan Opname pekerjaan di lapangan;
- g. Memfasilitasi penyusunan dan memverifikasi laporan-laporan Kegiatan KSM berupa laporan mingguan, bulanan, laporan pertanggungjawaban, photo dokumentasi dan melaporkannya kepada koordinator BKM;
- h. Memastikan semua infrastruktur memenuhi persyaratan teknis, baik, kuat, tahan lama, bermanfaat dan ada Tim Operasional dan Perawatan termasuk rencana kerjanya;
- i. Bersama Fasilitator Teknik dan Askot Infrastruktur melakukan verifikasi proposal KSM dan membuat berita acara verifikasi;
- j. Bersama Fasilitator Teknik, Askot Infrastruktur dan pihak KSM melakukan sertifikasi kegiatan.

4. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Peran KSM dalam kegiatan pelaksanaan P4IP adalah :

- a. Menyusun proposal kegiatan infrastruktur yang sudah disepakati bersama jenis kegiatan dan lokasinya;

- b. Mengelola dan melaksanakan kegiatan P4IP secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, serta memastikan prasarana yang dibangun tidak boleh menimbulkan dampak negatif.
- c. Menyampaikan jadwal kerja, rencana pengadaan bahan, alat, rencana pemeliharaan, rencana tenaga kerja, tim pelaksana kegiatan yang lebih rinci kepada UPL sebelum dilaksanakan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Kegiatan (MP2K);
- d. Melaksanakan musyawarah pengadaan bahan, alat, musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- e. Membangun prasarana dengan kualitas baik, bermanfaat sesuai kebutuhan masyarakat dan persyaratan teknis konstruksi;
- f. Membuat papan informasi kegiatan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum;
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dan mengarsipkannya;
- h. Melakukan perbaikan prasarana yang diperintahkan oleh konsultan dan UPL selama proses konstruksi berlangsung;
- i. Mendorong pelibatan masyarakat sebanyak-banyaknya dalam pelaksanaan kegiatan;
- j. Aktif melakukan penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul akibat pelaksanaan kegiatannya.

5. Relawan Masyarakat

Relawan masyarakat adalah pelopor penggerak dari masyarakat yang mengabdikan tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya.

Program ini mendorong masyarakat di lokasi sasaran agar membuka kesempatan seluas mungkin bagi warga yang ikhlas, jujur, adil, peduli dan memiliki komitmen untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan program agar bermanfaat bagi masyarakat miskin serta seluruh masyarakat di wilayahnya. Dengan demikian peran utama para relawan adalah :

- a. Penggerak masyarakat dalam menjalani seluruh proses kegiatan P4IP yang memang direncanakan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengawal proses partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokrasi
- c. Mitra kerja BKM dalam kegiatan P4IP.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Metode penelitian dilakukan melalui analisis deskriptif, yaitu suatu metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Analisis deskriptif ini dengan memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki bagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang kuat (Nawawi Hadari, 2001:64). Sedangkan Surachmad (1990:141) mengemukakan bahwa analisis deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah-masalah yang akan terjadi;
2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dipusatkan kemudian dianalisis.

Menurut Hadari Nawawi, (2001:64) : Bentuk-bentuk pokok metode deskriptif ada tiga, yaitu :

1. Survei (survey studies);
2. Studi hubungan (interrelationship studies);
3. Studi perkembangan (developmental studies).

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka bentuk penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah bentuk survei (*survey studies*). Menurut Moh. Mazir (1999:65), yang dimaksud dengan penelitian dalam bentuk survei adalah :

“Penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual”, dalam penelitian ini, yaitu dengan cara melakukan pengkajian, penggambaran maupun pengungkapan mengenai analisis tentang pelaksanaan program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman tahun anggaran 2013 di Kota Medan.

Instrumen penelitian ini berupa survei, kuesioner yang diberikan kepada sekelompok sampel, serta wawancara mendalam. Bentuk kuesioner dirancang dengan model Likert untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial.

Pelaksanaan penelitian dengan desain penelitian deskriptif analisis adalah sebagai berikut :

1. Mula-mula peneliti berupaya melakukan interpretasi secara meluas dan mendalam terhadap kemungkinan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program P4IP, kemudian dideskripsikan dan akan diuji melalui proses penelitian empirik;
2. Langkah berikutnya adalah kiat mengumpulkan data deskriptif dan menetapkan instrumen yang sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan atas variabel – variabel yang hendak diteliti, untuk menjangkau data dan informasi yang akurat. Keseluruhan dari proses hasil penelitian kemudian disajikan secara tertulis, namun dengan sifatnya yang induktif dan terbuka, dimungkinkan perubahan, perbaikan dan penyempurnaan atas dasar data yang terbaru.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Maret sampai dengan April 2015.

Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kota Medan dikarenakan memiliki jumlah warga miskin kelurahan/desa sasaran P4IP di Provinsi Sumatera Utara paling banyak, yaitu sekitar 37,57 persen dari total warga miskin lokasi program P4IP dan sisanya tersebar di 11 kota/kabupaten lainnya.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, tumbuhan, gejala, nilai test, atau peristiwa sebagai sumber daya yang memiliki karakteristik dalam sebuah penelitian (Nawawi, 1991:141).

Sedangkan menurut Sugiyono (2006:117) menyebutkan bahwa "populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat dikatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan dari obyek/subyek yang dapat dijadikan sebagai sumber data dalam suatu penelitian, dan mempunyai karakteristik tertentu.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dan mengetahui pelaksanaan P4IP di Kota Medan.

Sampel adalah wakil dari populasi yang menjadi objek penelitian, atau sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 1998:57).

Teori sampel dan sampling penelitian menurut Arikunto (2010:134-185) bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang hendak diteliti dan mewakili karakteristik populasi. Apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25 % atau lebih. Pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan dengan cara sampel acak, sampel berstrata, sampel wilayah, sampel proporsi, sampel kuota, sampel kelompok dan sampel kembar.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan cara sampel berstrata, sampel wilayah, sampel proporsi dan sampel kelompok.

Menurut pendapat Arikunto (2010) tersebut di atas, sehubungan unit analisis dalam penelitian ini merupakan orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan P4IP di Kota Medan, maka penulis memutuskan untuk tidak mengambil seluruh populasi yang ada karena jumlahnya terlalu besar. Untuk itu maka sampel yang diambil hanya berjumlah 66 orang.

Tabel 3.1. Komponen Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah	
		Populasi	Sampel
1.	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	72 Orang	40 Orang
2.	Lurah	8 Orang	8 Orang
3.	Kelompok Swadaya Masyarakat/Panitia	120 Orang	8 Orang
4.	Konsultan PNPM Mandiri Perkotaan	10 Orang	2 Orang
5.	Relawan Masyarakat	80 Orang	8 Orang
	Total	290 Orang	66 Orang

Dari tabel 3.1 diatas dapat dirincikan bahwa untuk delapan kelurahan pengelola P4IP sampel yang diambil pada tiap kelurahan dari masing-masing unsur adalah :

1. Sampel unsur BKM adalah koordinator dan empat personil anggotanya;
2. Sampel dari unsur kelurahan adalah Lurah;
3. Sampel dari unsur KSM yang diambil adalah ketua kelompoknya;
4. Sampel dari unsur konsultan yang diambil adalah Koordinator Kota Medan serta satu orang Assisten Koordinator Kota bidang infrastruktur;
5. Sampel dari unsur relawan masyarakat yang diambil adalah satu orang tokoh masyarakat.

Keputusan peneliti tetap pada keyakinan bahwa unit sampel yang diambil merupakan representasi dari unit populasi.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan cara :

- a. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk daftar pertanyaan yang berisikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan sistem pelayanan terhadap responden dengan menyajikan beberapa alternatif jawaban yang sudah ditentukan;
- b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan sumber informasi yang mengerti permasalahan yang diteliti terutama pada bidang yang menangani langsung pelaksanaan Program;
- c. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang ada keterkaitannya dengan penelitian seperti : laporan, artikel, literatur, dan berbagai bahan – bahan publikasi lainnya.

Untuk memperinci data-data sekaligus menyajikan persentase dari masing-masing jawaban responden maka setiap pertanyaan akan diberikan empat alternatif jawaban secara tertutup. Kemudian dari empat alternatif jawaban yang disediakan akan diberikan skor sebagai berikut:

- Untuk jawaban alternatif (A) diberi skor 4;
- Untuk jawaban alternatif (B) diberi skor 3;
- Untuk jawaban alternatif (C) diberi skor 2;
- Untuk jawaban alternatif (D) diberi skor 1.

3.5. Operasionalisasi Variabel

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel atau variabel tunggal, yaitu evaluasi program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur Permukiman tahun anggaran 2013 di Kota Medan.

Evaluasi pelaksanaan program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman adalah tindakan-tindakan dalam upaya mengukur keberhasilan tujuan program dalam upaya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kota Medan.

Kriteria-kriteria yang diukur dalam evaluasi Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman tahun anggaran 2013 di Kota Medan sesuai dengan William N Dunn (2003) adalah :

1. Efektivitas (effectiveness), meliputi : capaian hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter;
2. Efisiensi (efficiency), meliputi : jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;
3. Kecukupan (adequacy), meliputi : tingkat efektivitas dalam memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Kesamaan (equity) meliputi : keeratan hubungan antara rasionalitas legal dengan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
5. Responsivitas (responsiveness), meliputi : kebijakan yang dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas,

efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;

6. Ketepatan (appropriateness) meliputi : kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, dilakukan pula kajian pustaka tentang tata cara evaluasi pelaksanaan P4IP sebagai program pendukung PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Medan, serta wawancara semi terstruktur untuk mendalami masalah-masalah yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.6.1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan yang berasal dari penelitian di lapangan khususnya penyebaran angket keusioner kepada responden, maka penulis memakai analisa deskriptif dengan menggunakan tabel tunggal atau tabel frekuensi dengan tujuan data lebih terperinci sekaligus menyajikan persentase dari masing–masing jawaban responden sehingga didapat data yang lebih dominan.

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penulisan ini dengan tahapan :

1. Klasifikasi data, dalam hal ini data yang diperoleh diklasifikasikan dalam kelompok data kualitatif;
2. Tabulasi data, data yang telah diklasifikasi dimasukkan ke dalam tabel;
3. Interpretasi data, dengan diberikan ulasan secara kualitatif.

Selanjutnya data yang diolah tersebut dimasukkan ke dalam skala Likert.

Menurut Sugiyono (1998:74) bahwa: “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial”. Penggunaan skala Likert dalam penelitian ini mempunyai gradasi dari sangat positif hingga sangat negatif, dengan penilaian 4, 3, 2, dan 1.

Tabel 3.2. Skala Penilaian Untuk Pernyataan Positif dan Negatif

No	Keterangan	Skor Positif	Skor Negatif
1	Sangat Setuju	4	1
2	Setuju	3	2
3	Tidak Setuju	2	3
4	Sangat Tidak Setuju	1	4

(Sumber : Sugiyono, 2010:94)

3.6.2. Teknik Analisis Data

Untuk melaksanakan analisis data, dilakukan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan Arikunto (1996:205), sebagai berikut:

- a. Persiapan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
 1. Melakukan pengecekan data, identitas dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk analisis;
 2. Melakukan pemeriksaan seluruh data yang tertuang dalam instrumen penelitian;

3. Memeriksa tata cara pengisian data.

b. Tabulasi data, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Menjumlahkan setiap rangking tanggapan ke dalam empat rangking tanggapan di setiap nomor angket;
2. Pengkodean pada nomor-nomor tertentu yang tidak dapat rangking tanggapan terutama yang telah salah atau keliru dalam memberikan tanggapan.

c. Melakukan perubahan jenis data, yaitu dari data yang kuantitatif ke data kualitatif untuk diinterpretasikan secara kualitatif dengan melihat jumlah tanggapan yang telah disediakan pada angket.

Selanjutnya data-data dianalisis melalui analisis deskriptif dan selanjutnya menginterpretasikannya berdasarkan persentase dari alternatif jawaban yang telah dikemukakan responden. Rumus persentase yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\% = f / n \times 100$$

Keterangan :

% = Persentase tanggapan responden;

f = Frekuensi (jumlah responden) yang memberikan jawaban atas satu alternatif jawaban;

n = Jumlah seluruh anggota sampel yang diamati dan dimintai keterangan.

Hasil pengukuran dinilai berdasarkan pada pendapat Arikunto (1996:224) sebagai berikut :

Apabila hasil persentase mencapai:

- a. 76% - 100% = digolongkan baik;
- b. 56% - 75% = digolongkan cukup atau sedang;
- c. 40% - 55% = digolongkan kurang baik;
- d. Kurang dari 40% = digolongkan tidak baik.

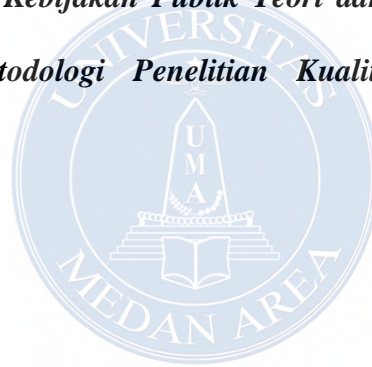


DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, 2006, *Kebijakan Publik*, Jakarta; Suara Bebas
- Agustino, Leo. 2006, *Politik & Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI Bandung
- Agustino, Leo. 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi, 1996, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta,
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek* (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta,
- Badan Pusat Statistik, 2013, *Medan Dalam Angka Tahun 2013*.
- Bryan & White, 1987, *Manajemen Pembangunan Untuk Pembangunan Negara Berkembang*, alih Bahasa Rusyanto L. Simatupang, Jakarta, LP3ES
- Chris I Nwagboso (Ph.D In-View) Assistant Lecturer Departement of Political Science University of Calabar, Calabar P.M.B 1115, Unical Cross River State-Nigeria, April 2012, *Public Policy and Challenges of Policy Evaluation in Third World*, “British Journal of Humaniora and Social Science”
- Direktorat Jendral Cipta Karya, 2013, *Petunjuk Pelaksanaan P4IP*, Jakarta
- Dr. Glenn Laverack, TDR, WHO Geneva, SEWA, ASHA, 26-30 Oktober 2009, *Community and Empowerment*, “Dokumen Kerja untuk Konferensi Global ke-7 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi kesehatan Asia Tenggara”.
- Dunn, William N., 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, terjemah *Public Policy Analysis; an Introduction*, Yogyakarta: Prasetia Widya Pratama
- Hadari Nawawi, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta; GMU Press.
- Hadari Nawawi, 1991, *Metode Pelatihan bidang Sosial*, Yogyakarta, GMU Press.
- Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004, *Rencana strategis Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2004-2009*, Jakarta.
- Kementerian Keuangan, 2012, *Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara dan Lembaga*, Jakarta.

- Kementerian Pekerjaan Umum, 2013, *Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM*, Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum, 2013, *Petunjuk Pelaksanaan P4IP*, Jakarta
- Marielle Berriet-Slliec, Pierre Labarthe, Catherine Laurent and Jacques Baudry, 17-18 February 2011, *Empirical Validity of The Evaluation and Quality of Evidence*. "International Journal of Sains and Research".
- Muhammad Rusli dan Hamsinah, Maret 2014, *Policy Evaluation Study on Subsidy Policy, Qualitative basis, for Poverty Alleviation in Pare-pare, South Sulawesi*, "International Journal of Sains and Research".
- Nazir, Moh, 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta; Graha Indonesia.
- Nugroho D Riant, 2011, *Public policy : Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Manajemen Dalam Kebijakan Publik sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Elex Media Computindo.
- Nugroho D Riant, 2008, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang, Banyu Media.
- Poerwandani, 2007, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia-Jakarta, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi.
- Republik Indonesia, 2006, *Peraturan Pemerintah No. 39 Tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2000, *Undang-Undang No. 25 Tentang Program Pembangunan Nasional*, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2013, *Undang-Undang No. 15 Tentang Perubahan atas undang-Undang No. 19 Tahun 2012 Tentang APBN Tahun 2013*, Jakarta.
- Putra, 2003, *Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dalam Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Pustaka Belajar.
- Remi dan Tjiptoherijanto, 2003, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta; Elex media Computindo.
- Roeminingsih dan Ariadi, 2005, *Dampak Pemberian Bantuan (Raskin) pada Masyarakat Kabupaten Nusa Tenggara Timur tahun 2000-2003*, Undip, Tesis Undip (Tidak Dipublikasi).
- Pemerintah kota Medan, 2010, *RPJMD kota Medan 2011-2015*.
- Pemerintah kota Medan, 2015, *Profil Kota Medan*, website Resmi Pemerintah Kota Medan.

- Soetanah B, Ramessur S dan Rojid S, 2009, *Does Infrastructure Alleviates Poverty in Developing Countries?*, "International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies".
- Sugiyono, 1998, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung; Alfabeta.
- Sugiyono, 2006, *Metode penelitian Bisnis*, Bandung; Alfabeta.
- Suharno, 2008, *Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta; UNY Press.
- Suharno, 2010, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta; UNY Press.
- Surachmad, Winarno, 1990, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Jakarta; Erlangga.
- Sutrisno, 1995, *Organisasi Sektor Publik*, Yogyakarta; Pustaka Utama.
- Wibawa dkk, 1994, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta; Erlangga.
- Winarno, Budi, 2007, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Media Press.
- Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta; Media Press.
- Woleong, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV.Remaja Rosdakarya.



Lampiran 1 : Kegiatan Infrastruktur P4IP Kota Medan

PEMANFAATAN BLM P4IP TA. 2013 DI KOTA MEDAN

No	KELURAHAN	NAMA KEGIATAN (tercantum dalam proposal)	Volume	Satuan	KSM	Rencana pembiayaan Kegiatan		
						BLM	Swadaya	Jumlah
		3			3	250.000.000	12.800.000	262.800.000
1.	Bagan Deli	Jalan Jerambah Beton	100	M	Lumba-lumba	98.600.000	2.500.000	101.100.000
		Jalan Paving Block	85	M	Gurita	72.500.000	5.000.000	77.500.000
		Jalan Paving Block	101	M	Ikan Paus	66.400.000	5.300.000	71.700.000
		B O P	1	LS		12.500.000		12.500.000
		4			4	250.000.000	10.416.000	260.416.000
2.	Belawan Bahagia	Jalan Jerambah Beton	207	M	Teratai I	91.876.000	3.428.000	95.304.000
		Jalan Jerambah Beton	190	M	Mawar	66.746.000	3.428.000	70.174.000
		Jalan Jerambah Beton	49	M	Melati	24.764.000	1.440.000	26.204.000
		Jalan Rabat Beton	80	M	Tetratai 2	54.114.000	2.120.000	56.234.000
		B O P	1	LS		12.500.000		12.500.000
		8			8	250.000.000	17.960.000	267.960.000
3.	Belawan Bahari	Sumur Bor	1	Unit	Salam Tengah	15.993.000	2.545.000	18.538.000
		Sumur Bor	1	Unit	Irian Dalam	15.993.000	2.545.000	18.538.000
		Dinding Penahan Tanah	207	M	Ambon	52.431.000	2.039.000	54.470.000
		Jalan Rabat Beton	80	M	Rupat Awal	18.285.000	2.085.000	20.370.000
		Dinding Penahan Tanah	24	M	Ambon Ujung 2	7.486.000	1.132.000	8.618.000
		Jalan Rabat Beton	253	M	Dame	57.509.000	2.995.000	60.504.000
		Sumur Bor	1	UNIT	Ambon Ujung 1	15.993.000	2.545.000	18.538.000
		Jalan Paving Block	105	M	Bersama	53.810.000	2.074.000	55.884.000
B O P	1	LS		12.500.000		12.500.000		
		5			5	250.000.000	18.100.000	268.100.000
4.	Belawan I	Jalan Rabat Beton	115	M	Mataram	48.700.000	3.600.000	52.300.000
		Jalan Rabat Beton	115	M	Palapa	48.700.000	3.600.000	52.300.000
		Jalan Rabat Beton	63	M	Keris	21.600.000	1.800.000	23.400.000
		Jalan Rabat Beton	150	M	Gajah Mada	73.400.000	5.400.000	78.800.000
		Jalan Rabat Beton	66	M	Majapahit	45.100.000	3.700.000	48.800.000
		B O P	1	LS		12.500.000		12.500.000
		5			5	250.000.000	14.300.000	264.300.000
5.	Belawan II	Jalan Rabat Beton	24	M	Bangka	13.700.000	500.000	14.200.000
		Jalan Rabat Beton	131	M	Amanah	60.100.000	4.000.000	64.100.000
		Jalan Rabat Beton	67	M	Salam	37.000.000	2.500.000	39.500.000
		Jalan Rabat Beton	87	M	Setia	98.600.000	3.400.000	102.000.000
		Jalan Rabat Beton	82	M	Al Falah	28.100.000	3.900.000	32.000.000
		B O P	1	LS		12.500.000		12.500.000
		6			6	250.000.000	28.382.000	278.382.000
6.	Belawan Pulau Sicanang	Paving Blok	213	M	Planet	64.660.000	2.190.000	66.850.000
		Drainase	166	M	Bulan	18.152.000	18.152.000	36.304.000
		Tembok Penahan Tanah	58	M	Air	10.732.000	1.964.000	12.696.000
		Drainase	400	M	Awan	61.648.000	1.948.000	63.596.000
		Drainase	112	M	Bintang	14.362.000	2.000.000	16.362.000
		Rabat Beton	220	M	Pelangi	67.946.000	2.128.000	70.074.000
		B O P	1	LS		12.500.000		12.500.000
		3			3	250.000.000	17.325.000	267.325.000
7.	Sei Mati	Paving Blok Jalan	300	M	Inpres	95.000.000	6.870.000	101.870.000
		Paving Blok Jalan	200	M	Lorong	71.250.000	5.335.000	76.585.000
		Paving Blok Jalan	150	M	Inpres	71.250.000	5.120.000	76.370.000
		B O P	1	LS		12.500.000		12.500.000
		4			3	250.000.000	27.030.000	277.030.000
8.	Labuhan Deli	Drainase 1	280	M	Makmur	95.000.000	11.305.000	106.305.000
		Drainase 2	104	M	Bestari	71.250.000	8.605.000	79.855.000
		Paving Blok	250	M				-
		Drainase 3	90	M	Ikhwan	71.250.000	7.120.000	78.370.000
		B O P	1	LS		12.500.000		12.500.000
Total		38			37	2.000.000.000	146.313.000	2.146.313.000

Lampiran 2 : Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN EVALUASI PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4IP) TAHUN ANGGARAN 2013 DI KOTA MEDAN

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara menjadi peserta survey dan secara sukarela mengisi kuesioner ini. Nama saya Nurwino, mahasiswa magister administrasi publik Universitas Medan Area, saat ini sedang mengadakan penelitian tentang evaluasi Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) tahun anggaran 2013 di Kota Medan. Kami sangat menghargai kejujuran Bapak/Ibu/Saudara dalam mengisi kuesioner ini. Kami menjamin kerahasiaan Bapak/Ibu/Saudara yang terkait dengan kuesioner. Hasil survey ini semata-mata akan digunakan untuk tujuan penelitian dan bukan untuk tujuan komersil.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meluncurkan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) sebagai upaya mengurangi beban hidup masyarakat miskin akibat perubahan besaran subsidi BBM. Anggaran P4IP tersebut berasal dari penghematan atau pemotongan anggaran Kementrian/Lembaga yang dihimpun Pemerintah dimaksudkan untuk menanggulangi keterbatasan infrastruktur dasar agar mampu secara optimal melaksanakan usaha dan roda perekonomian akibat buruknya infrastruktur dasar sebagai sarana penunjang kelancaran ekonomi masyarakat.

Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) dalam mendukung PNPM Mandiri Perkotaan dimaksudkan sebagai upaya memberikan kemudahan akses penyediaan infrastruktur permukiman, terutama bagi masyarakat miskin yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Melalui penyediaan infrastruktur Permukiman di Perkotaan tersebut diharapkan masyarakat miskin di wilayah sasaran dengan cepat dapat memulihkan kembali kesejahteraan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/KPTS/M/2013 Tanggal 29 Juli 2013, bahwa Kota Medan melaksanakan program P4IP di 8 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Pagu BLM
1	Medan Belawan	Bagan Deli	250.000.000
2	Medan Belawan	Belawan Bahagia	250.000.000
3	Medan Belawan	Belawan Bahari	250.000.000
4	Medan Belawan	Belawan I	250.000.000
5	Medan Belawan	Belawan II	250.000.000
6	Medan Belawan	Belawan Pulo Sicanang	250.000.000
7	Medan Labuhan	Sei Mati	250.000.000
8	Medan Marelan	Labuhan Deli	250.000.000
Total			2.000.000.000

Demikian gambaran singkat tersebut saya sampaikan, terimakasih atas partisipasi dan dukungan dalam membantu pelaksanaan tugas penelitian ini.

Hormat saya,

Nurwino

Mahasiswa Magister Administrasi Publik
Universitas Medan Area

No :

KUESIONER

Petunjuk: Berikan tanda centeng (✓) pada pilihan jawaban yang anda pilih

Nama : (jika bersedia)

Alamat :

..... Telp.

Pekerjaan : Golongan (khusus PNS) :

Jabatan :

Screening

Apakah anda mengetahui Program P4IP? () Ya () Tidak

Data Umum Responden

Jenis Kelamin () Laki-laki () Perempuan
Usia () < 30 tahun () 30-40 tahun () 40-50 tahun () > 50 tahun
Pendidikan () SD () SLTP () SLTA () Diploma
() S1 () ≥ S2

Profil Pemahaman Terhadap Program P4IP

1. Dari mana anda pertama kali mengetahui tentang P4IP?

() media massa () lingkungan rumah () tempat kerja () fasilitator

2. Hal apa yang pertama kali anda ketahui terkait P4IP?

() program pemerintah () penanggulangan kemiskinan
() pembangunan infrastruktur () program pendukung PNPM Mandiri Perkotaan

Tingkat Kecenderungan/Variabel Penelitian

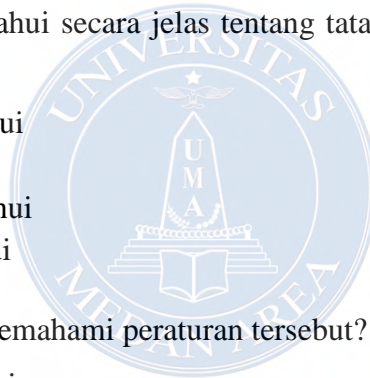
Petunjuk: Berikan nilai pada setiap pertanyaan atau pernyataan yang ada dengan penjelasan sebagai berikut:

a = sangat baik
b = baik
c = biasa saja
d = kurang baik

Variabel Penelitian

A. Efektivitas

1. Apakah anda mengetahui secara jelas tentang Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) di Kota Medan?
 - (a) Sangat Mengetahui
 - (b) Mengetahui
 - (c) Kurang Mengetahui
 - (d) Tidak Mengetahui
2. Apakah anda mengetahui secara jelas tujuan/sasaran Program P4IP di Kota Medan?
 - (a) Sangat Mengetahui
 - (b) Mengetahui
 - (c) Kurang Mengetahui
 - (d) Tidak Mengetahui
3. Apakah anda mengetahui secara jelas tentang tata cara pelaksanaan Program P4IP di Kota Medan?
 - (a) Sangat Mengetahui
 - (b) Mengetahui
 - (c) Kurang Mengetahui
 - (d) Tidak Mengetahui
4. Apakah anda dapat memahami peraturan tersebut?
 - (a) Sangat Memahami
 - (b) Memahami
 - (c) Kurang Memahami
 - (d) Tidak Memahami
5. Apakah anda mengetahui secara jelas bahwa pengelolaan P4IP dilaksanakan sesuai dengan tahapannya?
 - (a) Sangat Mengetahui
 - (b) Mengetahui
 - (c) Kurang Mengetahui
 - (d) Tidak Mengetahui
6. Menurut anda, apakah kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tercantum dalam PJM Pronangkis Kelurahan?
 - (a) Sangat Sesuai
 - (b) Sesuai
 - (c) Kurang Sesuai
 - (d) Tidak Sesuai



7. Apakah anda mendapatkan sosialisasi dan peningkatan kapasitas yang memadai terkait Program P4IP?
 - (a) Sangat Memadai
 - (b) Memadai
 - (c) Kurang Memadai
 - (d) Tidak Memadai
8. Apakah anda mengetahui tentang penyusunan rencana kerja dalam pelaksanaan Program P4IP di Kelurahan anda?
 - (a) Sangat Mengetahui
 - (b) Mengetahui
 - (c) Kurang Mengetahui
 - (d) Tidak Mengetahui
9. Menurut anda, apakah rencana kerja tersebut telah disusun dengan baik?
 - (a) Sangat Baik
 - (b) Baik
 - (c) Kurang Baik
 - (d) Tidak Baik
10. Apakah anda mengetahui tentang kelengkapan sarana dan prasarana kerja dalam pelaksanaan P4IP di Kelurahan anda?
 - (a) Sangat Mengetahui
 - (b) Mengetahui
 - (c) Kurang Mengetahui
 - (d) Tidak Mengetahui
11. Menurut anda, apakah sarana dan prasarana kerja tersebut sudah memadai?
 - (a) Sangat Memadai
 - (b) Memadai
 - (c) Kurang Memadai
 - (d) Tidak Memadai
12. Menurut anda, apakah kemampuan kelompok kerja yang melaksanakan kegiatan P4IP sudah memadai?
 - (a) Sangat Memadai
 - (b) Memadai
 - (c) Kurang Memadai
 - (d) Tidak Memadai
13. Seberapa seringkah anda mendapat coaching dan pelatihan terkait pengelolaan Program P4IP yang anda dapatkan secara formal maupun non formal?
 - (a) Sangat Sering
 - (b) Cukup Sering
 - (c) Jarang Terjadi
 - (d) Tidak Pernah

14. Menurut anda, apakah pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan P4IP di Kelurahan anda dilakukan secara intensif dan rutin?
- (a) Sangat Intensif dan Rutin
 - (b) Cukup Intensif dan Rutin
 - (c) Kurang Intensif dan Rutin
 - (d) Tidak Intensif dan Rutin

B. Efisiensi

15. Apakah anda mengetahui Rencana Anggaran Biaya dalam pelaksanaan P4IP di Kelurahan anda?
- (a) Sangat Mengetahui
 - (b) Mengetahui
 - (c) Kurang Mengetahui
 - (d) Tidak Mengetahui
16. Menurut anda, apakah Tenaga Kerja yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan P4IP di Kelurahan anda sesuai dengan volume dan jenis kegiatan yang dibangun?
- (a) Sangat Sesuai
 - (b) Sesuai
 - (c) Kurang Sesuai
 - (d) Tidak Sesuai
17. Menurut anda, apakah biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan P4IP di Kelurahan anda sesuai dengan volume dan jenis kegiatan yang dibangun?
- (a) Sangat Sesuai
 - (b) Sesuai
 - (c) Kurang Sesuai
 - (d) Tidak Sesuai
18. Menurut anda, apakah pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Kelurahan anda sesuai dengan waktu yang rencanakan?
- (a) Sangat Sesuai
 - (b) Sesuai
 - (c) Kurang Sesuai
 - (d) Tidak Sesuai
19. Apakah peran konsultan/fasilitator berpengaruh dalam pelaksanaan Program P4IP di Kelurahan anda?
- (a) Sangat Berpengaruh
 - (b) Berpengaruh
 - (c) Kurang Berpengaruh
 - (d) Tidak Berpengaruh

C. Kecukupan

20. Apakah infrastruktur yang dibangun di Kelurahan anda sesuai dengan rencana kegiatan prioritas kebutuhan masyarakat seperti yang terdapat dalam Rencana Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan?
- (a) Sangat sesuai
 - (b) Sesuai
 - (c) Kurang Sesuai
 - (d) Tidak Sesuai
21. Apakah hasil kegiatan pembangunan infrastruktur dalam P4IP di Kelurahan anda bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat?
- (a) Sangat Bermanfaat
 - (b) Bermanfaat
 - (c) Kurang Bermanfaat
 - (d) Tidak Bermanfaat
22. Apakah kegiatan yang dibangun sudah mencukupi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat?
- (a) Sangat Mencukupi
 - (b) Mencukupi
 - (c) Kurang Mencukupi
 - (d) Tidak Mencukupi

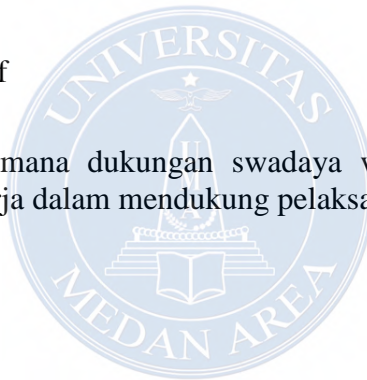
D. Kesamaan (Keadilan)

23. Apakah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan anda selalu melibatkan warga masyarakat dalam rembuk warga?
- (a) Sangat Sering
 - (b) Sering
 - (c) Jarang
 - (d) Tidak Pernah
24. Menurut anda, apakah hasil kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat?
- (a) Sangat Bermanfaat
 - (b) Bermanfaat
 - (c) Kurang Bermanfaat
 - (d) Tidak Bermanfaat
25. Menurut anda, apakah warga masyarakat merasa memiliki hasil kegiatan infrastruktur yang telah dibangun?
- (a) Sangat Merasa Memiliki
 - (b) Merasa Memiliki
 - (c) Kurang Merasa Memiliki
 - (d) Tidak Merasa Memiliki

26. Apakah hasil kegiatan pembangunan infrastruktur dimanfaatkan dan dirawat secara intensif oleh masyarakat?
- (a) Sangat intensif
 - (b) Intensif
 - (c) Kurang Intensif
 - (d) Tidak Intensif

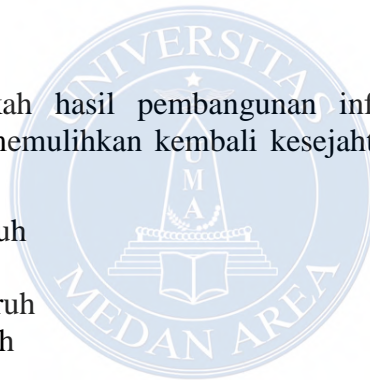
E. Responsivitas

27. Menurut anda, apakah warga masyarakat mendukung pelaksanaan program P4IP di Kelurahan anda?
- (a) Sangat Mendukung
 - (b) Mendukung
 - (c) Kurang Mendukung
 - (d) Tidak Mendukung
28. Menurut anda, apakah warga masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Program P4IP di Kelurahan anda?
- (a) Sangat Partisipatif
 - (b) Partisipatif
 - (c) Kurang Partisipatif
 - (d) Tidak Partisipatif
29. Menurut anda, bagaimana dukungan swadaya warga masyarakat berupa dana, material atau upah kerja dalam mendukung pelaksanaan kegiatan P4IP?
- (a) Sangat Baik
 - (b) Baik
 - (c) Kurang Baik
 - (d) Tidak Baik
30. Menurut anda, apakah hasil pelaksanaan kegiatan P4IP memuaskan kebutuhan warga masyarakat di Kelurahan anda?
- (a) Sangat Memuaskan
 - (b) Memuaskan
 - (c) Kurang Memuaskan
 - (d) Tidak Memuaskan
31. Menurut anda, bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap Program P4IP di Kelurahan anda?
- (a) Sangat Positif
 - (b) Positif
 - (c) Kurang Positif
 - (d) Tidak Positif



F. Ketepatan

32. Menurut anda, apakah kelurahan anda memang layak mengelola program P4IP jika dibandingkan dengan Kelurahan lain di Kota Medan?
- (a) Sangat Layak
 - (b) Layak
 - (c) Kurang Layak
 - (d) Tidak Layak
33. Menurut anda, apakah efektif jika pengelolaan program P4IP dilaksanakan dengan pola swakelola dan partisipatif melalui pemberdayaan masyarakat?
- (a) Sangat Efektif
 - (b) Efektif
 - (c) Kurang Efektif
 - (d) Tidak Efektif
34. Menurut anda, apakah pembangunan infrastruktur pada program P4IP berhasil memberikan kemudahan akses infrastruktur bagi masyarakat?
- (a) Sangat Berhasil
 - (b) Berhasil
 - (c) Kurang Berhasil
 - (d) Tidak Berhasil
35. Menurut anda, apakah hasil pembangunan infrastruktur pada program P4IP berpengaruh dalam memulihkan kembali kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat?
- (a) Sangat Berpengaruh
 - (b) Berpengaruh
 - (c) Kurang Berpengaruh
 - (d) Tidak Berpengaruh
36. Menurut anda, apakah penentuan lokasi pembangunan infrastruktur pada program P4IP di Kelurahan saudara sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama bagi seluruh warga miskin?
- (a) Sangat Sesuai
 - (b) Sesuai
 - (c) Kurang Sesuai
 - (d) Tidak Sesuai
37. Menurut anda, apakah infrastruktur yang dibangun pada program P4IP di Kelurahan anda akan tetap bermanfaat secara maksimal hingga 5 tahun ke depan?
- (a) Sangat Bermanfaat
 - (b) Bermanfaat
 - (c) Kurang Bermanfaat
 - (d) Tidak Bermanfaat



Lampiran 3 : Tabulasi Hasil Jawaban Kuesioner

TABULASI HASIL JAWABAN KUESIONER

No	Variabel Penelitian	Jumlah Nilai				
		4	3	2	1	Σ
A. EFEKTIVITAS		14,72%	70,89%	14,39%	0,00%	100,00%
		14,72%	53,17%	7,20%	0,00%	75,08%
1.	Apakah anda mengetahui secara jelas tentang Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) di Kota Medan?	17	40	9	0	66
		25,76%	60,61%	13,64%	0,00%	100,00%
2.	Apakah anda mengetahui secara jelas tujuan/sasaran Program P4IP di Kota Medan?	12	39	15	0	66
		18,18%	59,09%	22,73%	0,00%	100,00%
3.	Apakah anda mengetahui secara jelas tentang tata cara pelaksanaan Program P4IP di Kota Medan?	14	38	14	0	66
		21,21%	57,58%	21,21%	0,00%	100,00%
4.	Apakah anda dapat memahami peraturan tersebut?	9	41	16	0	66
		13,64%	62,12%	24,24%	0,00%	100,00%
5.	Apakah anda mengetahui secara jelas bahwa pengelolaan P4IP dilaksanakan sesuai dengan tahapannya?	27	39	0	0	66
		40,91%	59,09%	0,00%	0,00%	100,00%
6.	Menurut anda, apakah kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tercantum dalam PJM Pronangkis Kelurahan?	8	44	14	0	66
		12,12%	66,67%	21,21%	0,00%	100,00%
7.	Apakah anda mendapatkan sosialisasi dan peningkatan kapasitas yang memadai terkait Program P4IP?	4	50	12	0	66
		6,06%	75,76%	18,18%	0,00%	100,00%
8.	Apakah anda mengetahui tentang penyusunan rencana kerja dalam pelaksanaan Program P4IP di Kelurahan anda?	8	58	0	0	66
		12,12%	87,88%	0,00%	0,00%	100,00%
9.	Menurut anda, apakah rencana kerja tersebut telah disusun dengan baik?	1	59	6	0	66
		1,52%	89,39%	9,09%	0,00%	100,00%
10.	Apakah anda mengetahui tentang kelengkapan sarana dan prasarana kerja dalam pelaksanaan P4IP di Kelurahan anda?	2	58	6	0	66
		3,03%	87,88%	9,09%	0,00%	100,00%
11.	Menurut anda, apakah sarana dan prasarana kerja tersebut sudah memadai?	0	57	9	0	66
		0,00%	86,36%	13,64%	0,00%	100,00%
12.	Menurut anda, apakah kemampuan kelompok kerja yang melaksanakan kegiatan P4IP sudah memadai?	0	57	9	0	66
		0,00%	86,36%	13,64%	0,00%	100,00%
13.	Seberapa seringkah anda mendapat coaching dan pelatihan terkait pengelolaan Program P4IP yang anda dapatkan secara formal maupun non formal?	16	43	7	0	66
		24,24%	65,15%	10,61%	0,00%	100,00%
14.	Menurut anda, apakah pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan P4IP di Kelurahan anda dilakukan secara intensif dan rutin?	18	32	16	0	66
		27,27%	48,48%	24,24%	0,00%	100,00%

No	Variabel Penelitian	Jumlah Nilai				
		4	3	2	1	Σ
B. EFISIENSI		0,30%	36,67%	45,45%	17,58%	100,00%
		0,30%	27,50%	22,73%	4,39%	54,92%
15.	Apakah anda mengetahui Rencana Anggaran Biaya dalam pelaksanaan P4IP di Kelurahan anda?	1	38	27	0	66
		1,52%	57,58%	40,91%	0,00%	100,00%
16.	Menurut anda, apakah Tenaga Kerja yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan P4IP di Kelurahan anda sesuai dengan volume dan jenis kegiatan yang dibangun?	0	14	33	19	66
		0,00%	21,21%	50,00%	28,79%	100,00%
17.	Menurut anda, apakah biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan P4IP di Kelurahan anda sesuai dengan volume dan jenis kegiatan yang dibangun?	0	10	41	15	66
		0,00%	15,15%	62,12%	22,73%	100,00%
18.	Menurut anda, apakah pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Kelurahan anda sesuai dengan waktu yang rencanakan?	0	7	35	24	66
		0,00%	10,61%	53,03%	36,36%	100,00%
19.	Apakah peran konsultan/fasilitator berpengaruh dalam pelaksanaan Program P4IP di Kelurahan anda?	0	52	14	0	66
		0,00%	78,79%	21,21%	0,00%	100,00%
C. KECUKUPAN		14,14%	63,13%	21,72%	1,01%	100,00%
		14,14%	47,35%	10,86%	0,25%	72,60%
20.	Apakah infrastruktur yang dibangun di Kelurahan anda sesuai dengan rencana kegiatan prioritas kebutuhan masyarakat seperti yang terdapat dalam Rencana Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan?	11	42	13	0	66
		16,67%	63,64%	19,70%	0,00%	100,00%
21.	Apakah hasil kegiatan pembangunan infrastruktur dalam P4IP di Kelurahan anda bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat?	12	54	0	0	66
		18,18%	81,82%	0,00%	0,00%	100,00%
22.	Apakah kegiatan yang dibangun sudah mencukupi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat?	5	29	30	2	66
		7,58%	43,94%	45,45%	3,03%	100,00%
D. KESAMAAN (KEADILAN)		16,29%	69,32%	13,64%	0,76%	100,00%
		16,29%	51,99%	6,82%	0,19%	75,28%
23.	Apakah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan anda selalu melibatkan warga masyarakat dalam rembug warga?	21	45	0	0	66
		31,82%	68,18%	0,00%	0,00%	100,00%
24.	Menurut anda, apakah hasil kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat?	17	42	7	0	66
		25,76%	63,64%	10,61%	0,00%	100,00%
25.	Menurut anda, apakah warga masyarakat merasa memiliki hasil kegiatan infrastruktur yang telah dibangun?	3	54	9	0	66
		4,55%	81,82%	13,64%	0,00%	100,00%
26.	Apakah hasil kegiatan pembangunan infrastruktur dimanfaatkan dan dirawat secara intensif oleh masyarakat?	2	42	20	2	66
		3,03%	63,64%	30,30%	3,03%	100,00%

No	Variabel Penelitian	Jumlah Nilai				
		4	3	2	1	Σ
E. RESPONSIVITAS		13,64%	53,03%	33,33%	0,00%	100,00%
		13,64%	39,77%	16,67%	0,00%	70,08%
27.	Menurut anda, apakah warga masyarakat mendukung pelaksanaan program P4IP di Kelurahan anda?	9	39	18	0	66
		13,64%	59,09%	27,27%	0,00%	100,00%
28.	Menurut anda, apakah warga masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Program P4IP di Kelurahan anda?	6	31	29	0	66
		9,09%	46,97%	43,94%	0,00%	100,00%
29.	Menurut anda, bagaimana dukungan swadaya warga masyarakat berupa dana, material atau upah kerja dalam mendukung pelaksanaan kegiatan P4IP?	4	32	30	0	66
		6,06%	48,48%	45,45%	0,00%	100,00%
30.	Menurut anda, apakah hasil pelaksanaan kegiatan P4IP memuaskan kebutuhan warga masyarakat di Kelurahan anda?	9	33	24	0	66
		13,64%	50,00%	36,36%	0,00%	100,00%
31.	Menurut anda, bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap Program P4IP di Kelurahan anda?	17	40	9	0	66
		25,76%	60,61%	13,64%	0,00%	100,00%
F. KETEPATAN		46,21%	42,17%	11,62%	0,00%	100,00%
		46,21%	31,63%	5,81%	0,00%	83,65%
32.	Menurut anda, apakah kelurahan anda memang layak mengelola program P4IP jika dibandingkan dengan Kelurahan lain di Kota Medan?	54	12	0	0	66
		81,82%	18,18%	0,00%	0,00%	100,00%
33.	Menurut anda, apakah efektif jika pengelolaan program P4IP dilaksanakan dengan pola swakelola dan partisipatif melalui pemberdayaan masyarakat?	41	25	0	0	66
		62,12%	37,88%	0,00%	0,00%	100,00%
34.	Menurut anda, apakah pembangunan infrastruktur pada program P4IP berhasil memberikan kemudahan akses infrastruktur bagi masyarakat?	26	37	3	0	66
		39,39%	56,06%	4,55%	0,00%	100,00%
35.	Menurut anda, apakah hasil pembangunan infrastruktur pada program P4IP berpengaruh dalam memulihkan kembali kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat?	26	28	12	0	66
		39,39%	42,42%	18,18%	0,00%	100,00%
36.	Menurut anda, apakah penentuan lokasi pembangunan infrastruktur pada program P4IP di Kelurahan saudara sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama bagi seluruh warga miskin?	24	30	12	0	66
		36,36%	45,45%	18,18%	0,00%	100,00%
37.	Menurut anda, apakah infrastruktur yang dibangun pada program P4IP di Kelurahan anda akan tetap bermanfaat secara maksimal hingga 5 tahun ke depan?	12	35	19	0	66
		18,18%	53,03%	28,79%	0,00%	100,00%
Jumlah Setiap Skor		436	1426	518	62	2442
		71,94%				

Lampiran 4 : Tabulasi Hasil Wawancara

TABULASI HASIL WAWANCARA

No	Pertanyaan	Jumlah Responden	Klasifikasi Jawaban		Keterangan
			Positif	Negatif	
A Efektivitas					
1	Menurut Bapak/Ibu, apakah seluruh warga mengetahui adanya P4IP di Kelurahan ini?	66	66	0	Telah dilaksanakan Sosialisasi P4IP Tingkat Kota/kab dan Kelurahan.
2	Bapak/Ibu tadi mengatakan bahwa telah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan tentang P4IP. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tujuan P4IP, khususnya di Kelurahan ini?	66	51	15	Belum seluruh responden mengetahui tujuan P4IP secara detail di delapan Kelurahan pengelola P4IP di Kota Medan.
3	Tadi Bapak/Ibu menyinggung masalah tahapan-tahapan dalam P4IP, apakah tahapan tersebut dilakukan di Kelurahan ini?	66	66	0	Tahapan dalam pelaksanaan P4IP dilaksanakan dengan baik di delapan lokasi P4IP di Kota Medan.
4	Kapan terakhir kali Bapak/Ibu mengetahui pelaksanaan review PJM Pronangkis di Kelurahan ini?apakah kegiatan infrastruktur P4IP yang dibangun ada dalam PJM Pronangkis tersebut?apakah kebutuhan prioritas?	66	52	14	PJM Pronangkis direview setahun sekali saat Rembug Warga Tahunan. Kegiatan yang di bangun ada dalam PJM namun tidak semuanya kebutuhan prioritas.
5	Setiap melaksanakan kegiatan pastinya harus dibarengi perencanaan yang baik, apakah Bapak/Ibu dapat menjelaskan bagaimana penyusunan rencana kerja dalam pelaksanaan P4IP di Kelurahan ini?	66	66	0	Rencana Kerja telah disusun dengan baikdan telah disepakati bersama. Tetapi pelaksanaan di lapangan tidak seluruhnya sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan rapi.
6	Siapa yang melaksanakan pembangunan infrastruktur di Kelurahan ini? Apakah mereka memiliki kemampuan kerja yang memadai?	66	57	9	Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Tetapi kemampuan anggota KSM tidak merata.
7	Apakah alat-alat kerja yang mereka pergunakan sudah lengkap?	66	57	9	Alat kerja yang dipergunakan KSM tidak lengkap.
8	Apakah Bapak/Ibu ikut mengawasi pelaksanaan P4IP di Kelurahan ini?	66	60	6	Rresponden mengawasi pelaksanaan P4IP
9	Siapa saja yang selalu aktif mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan?	66	50	16	Konsultan, sebagian BKM, relawan. Pemda, sebagian BKM yang lain tidak intensif.
B Efisiensi					
1	Apakah Bapak/Ibu mengetahui besar BLM yang diterima Kelurahan ini melalui BKM?	66	66	0	Seluruh responden mengetahui besar BLM P4IP di Kelurahan masing-masing.
2	Kegiatan apa saja yang dibangun di Kelurahan ini?	66	66	0	Rresponden menyebutkan kegiatan yang dibangun.
3	Apakah Bapak/Ibu mengetahui RAB kegiatan tersebut?	66	66	0	Responden mengetahui RAB kegiatan infrastruktur P4IP.
4	Sesuai pengamatan Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan pembangunan infrastruktur P4IP di Kelurahan ini sesuai dengan RAB?	66	14	52	Sebagian besar responden mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan RAB.

No	Pertanyaan	Jumlah Responden	Klasifikasi Jawaban		Keterangan
			Positif	Negatif	
C Kecukupan					
1.	Apakah kegiatan infrastruktur yang dibangun di Kelurahan ini adalah kebutuhan masyarakat yang paling di prioritaskan?	66	53	13	Tidak seluruh kegiatan yang dibangun merupakan kebutuhan prioritas masyarakat.
2.	Setelah dibangun apakah bangunan tersebut bermanfaat bagi masyarakat, terutama warga miskin?	66	66	0	Hasil pembangunan infrastruktur tetap bermanfaat bagi masyarakat.
3.	Apakah masyarakat merasa puas dan merasa tercukupi karena kebutuhan prioritasnya telah dibangun melalui P4IP?	66	34	32	Tingkat kecukupan masyarakat hampir seimbang antara yang cukup dan yang tidak.
D Kesamaan (Keadilan)					
1.	Tadi Bapak/Ibu mengatakan bahwa masyarakat mengetahui adanya P4IP di Kelurahan ini, apakah dalam setiap rembug warga dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan mereka selalu di ajak?	66	66	0	Masyarakat selalu di undang dan diikuti sertakan dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan P4IP di Kelurahan, akan tetapi tingkat kehadirannya masih jauh dari yang diharapkan.
2.	Apakah hasil pembangunan infrastruktur P4IP dapat dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat Kelurahan ini?	66	59	7	Secara umum hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3.	Bagaimana cara mereka merawat bangunan ini agar dapat bermanfaat selama mungkin?	66	44	22	66 persen mengatakan bahwa kelompok pemelihara telah berjalan baik.
E Responsivitas					
1.	Seperti yang Bapak/Ibu rasakan apakah pelaksanaan P4IP di Kelurahan ini sudah menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat?	66	42	24	Sebahagian Kebutuhan masyarakat telah diakomodir oleh pemerintah melalui P4IP.
2.	Menurut Bapak/Ibu masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintah dan mendukung kebijakan pemerintah melalui P4IP, apa bentuk dukungan yang diberikan oleh masyarakat?	66	48	18	Masyarakat mendukung kebijakan pemerintah dengan cara swadaya material, tenaga dan alat kerja pendukung agar hasilnya maksimal.
F Ketepatan					
1.	Apakah Kelurahan ini memang pantas mendapatkan P4IP?	66	66	0	Delapan Kelurahan memang layak mengelola P4IP.
2.	Menurut Bapak/Ibu, apakah yang membuat Kelurahan ini pantas mengelola P4IP?	66	66	0	banyaknya infrastuktur dasar yang harus dibenahi sebagai akses transportasi.
3.	Menurut Bapak/Ibu, manakah yang lebih baik jika pembangunan infrastruktur P4IP dilaksanakan oleh kontraktor atau masyarakat dengan pola swakelola melalui pemberdayaan masyarakat?kenapa?	66	66	0	Pembangunan jauh lebih baik dilaksanakan dengan swakelola melalui pemberdayaan masyarakat daripada dikerjakan oleh kontraktor.
4.	Bapak/Ibu tadi mengatakan bahwa pelaksanaan P4IP di Kelurahan ini rata-rata tidak sesuai dengan RAB, apakah kegiatan yang dibangun dapat bertahan minimal 5 tahun?	66	43	23	Dibeberapa lokasi bangunan infrastruktur P4IP perlu direnovasi dan disebagian besar lokasi kondisinya masih baik hingga 3-5 tahun.

Lampiran 5 : Dokumentasi Kegiatan P4IP Kota Medan

a. Kelurahan Bagan Deli

	<p>Keterangan :</p> <p>Kondisi awal jalan yang selalu tergenang pada saat air laut pasang. Kondisi ini sangat mengganggu akses transportasi bagi masyarakat. Berdasarkan Usulan kegiatan sesuai PJM pronangkis bahwa kegiatan ini merupakan usulan kegiatan prioritas.</p> <p>Kegiatan ini dikerjakan oleh masyarakat melalui Kelompok swadaya masyarakat dengan nilai BLM sebesar Rp. 66.400.000,- dan tambahan dana dari swadaya masyarakat sebesar Rp. 5.300.000,-</p>
<p>Pembangunan Jalan Paving Block Sepanjang 101 M² Kondisi 0%</p>	
	<p>Keterangan :</p> <p>Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan pada kondisi 50%.</p> <p>Untuk menghindari genangan air dilakukan peninggian badan jalan dan pemadatan secara bertahap. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pola swakelola dengan mengajak masyarakat setempat berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hingga pemeliharannya.</p> <p>Kegiatan ini mengalami keterlambatan penyelesaian hingga 4 minggu karena faktor cuaca dan kurangnya sarana kerja terutama untuk pemadatan baan jalan.</p>
<p>Pembangunan Jalan Paving Block Sepanjang 101 M² Kondisi 50%</p>	
	<p>Keterangan :</p> <p>Pembangunan jalan paving Block pada kondisi 100%.</p> <p>Jalan ini merupakan salah satu jalan utama di kelurahan Bagan Deli yang dilalui oleh mayoritas penduduknya.</p> <p>Telah dibentuk kelompok pemelihara prasarana yang telah dibangun, akan tetapi pelaksanaannya belum optimal. Hal ini akan berakibat pada umur bangunan yang tidak akan bertahan lama.</p> <p>Diperlukan sosialisasi terus menerus terkait dengan pentingnya pemeliharaan prasarana agar fungsinya tetap terjaga hingga waktu yang lama.</p>
<p>Pembangunan Jalan Paving Block Sepanjang 101 M² Kondisi 100%</p>	

b. Kelurahan belawan Pulau Sicanang

	<p>Keterangan :</p> <p>Kondisi awal jalan yang selalu tergenang pada saat air laut pasang. Kondisi ini sangat mengganggu akses transportasi bagi masyarakat. Berdasarkan Usulan kegiatan sesuai PJM pronangkis bahwa kegiatan ini merupakan usulan kegiatan prioritas.</p> <p>Kegiatan ini dikerjakan oleh masyarakat melalui Kelompok swadaya masyarakat dengan nilai BLM sebesar Rp. 64.660.000,- dan tambahan dana dari swadaya masyarakat sebesar Rp. 2.190.000,-</p>
<p>Pembangunan Jalan Paving Block Sepanjang 213 M' Kondisi 0%</p>	

	<p>Keterangan :</p> <p>Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan pada kondisi 50%.</p> <p>Untuk menghindari genangan air dilakukan peninggian badan jalan dan pemadatan secara bertahap. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pola swakelola dengan mengajak masyarakat setempat berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hingga pemeliharaannya.</p> <p>Kegiatan ini mengalami keterlambatan penyelesaian hingga 4 minggu karena faktor cuaca dan kurangnya sarana kerja terutama untuk pemadatan badan jalan.</p>
<p>Pembangunan Jalan Paving Block Sepanjang 213 M' Kondisi 50%</p>	

	<p>Keterangan :</p> <p>Pembangunan jalan paving Block pada kondisi 100%.</p> <p>Jalan ini merupakan salah satu jalan utama di kelurahan Belawan Pulau Sicanang yang dilalui oleh mayoritas penduduknya.</p> <p>Telah dibentuk kelompok pemelihara prasarana yang telah dibangun, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Hal ini akan berakibat pada umur bangunan yang tidak akan bertahan lama.</p> <p>Diperlukan sosialisasi terus menerus terkait dengan pentingnya pemeliharaan prasarana agar fungsinya tetap terjaga hingga waktu yang lama.</p>
<p>Pembangunan Jalan Paving Block Sepanjang 213 M' Kondisi 100%</p>	

c. Kelurahan Belawan I

	<p>Keterangan :</p> <p>Kondisi awal jalan yang selalu tergenang air pada saat hujan. Kondisi ini sangat mengganggu akses transportasi bagi masyarakat. Berdasarkan Usulan kegiatan sesuai PJM pronangkis bahwa kegiatan ini merupakan usulan kegiatan prioritas.</p> <p>Kegiatan ini dikerjakan oleh masyarakat melalui Kelompok swadaya masyarakat dengan nilai BLM sebesar Rp. 73.400.000,- dan tambahan dana dari swadaya masyarakat sebesar Rp. 5.400.000,-</p>
<p>Pembangunan Jalan rabat beton sepanjang 150 M' Kondisi 0%</p>	
	<p>Keterangan :</p> <p>Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan rabat beton pada kondisi 50%.</p> <p>Untuk menghindari genangan air dilakukan peninggian badan jalan dan pemadatan secara bertahap. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pola swakelola dengan mengajak masyarakat setempat berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hingga pemeliharaannya.</p> <p>Kegiatan ini mengalami keterlambatan penyelesaian hingga 4 minggu karena faktor cuaca dan kurangnya sarana kerja terutama untuk pemadatan badan jalan.</p>
<p>Pembangunan Jalan rabat beton sepanjang 150 M' Kondisi 50%</p>	
	<p>Keterangan :</p> <p>Pembangunan jalan rabat beton pada kondisi 100%.</p> <p>Jalan ini merupakan salah satu jalan utama di kelurahan Belawan I yang dilalui oleh mayoritas penduduknya.</p> <p>Telah dibentuk kelompok pemelihara prasarana yang telah dibangun, akan tetapi pelaksanaannya belum optimal. Hal ini akan berakibat pada umur bangunan yang tidak akan bertahan lama.</p> <p>Diperlukan sosialisasi terus menerus terkait dengan pentingnya pemeliharaan prasarana agar fungsinya tetap terjaga hingga waktu yang lama.</p>
<p>Pembangunan Jalan rabat beton sepanjang 150 M' Kondisi 100%</p>	

d. Kelurahan Belawan II

	<p>Keterangan :</p> <p>Kondisi awal jalan yang tidak representatif untuk dilalui. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat sekitarnya. Berdasarkan Usulan kegiatan sesuai PJM pronangkis bahwa kegiatan ini merupakan usulan kegiatan prioritas.</p> <p>Kegiatan ini dikerjakan oleh masyarakat melalui Kelompok swadaya masyarakat dengan nilai BLM sebesar Rp. 98.600.000,- dan tambahan dana dari swadaya masyarakat sebesar Rp. 3.400.000,-</p>
<p>Pembangunan Jalan rabat beton sepanjang 87 M' Kondisi 0%</p>	
	<p>Keterangan :</p> <p>Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan rabat beton pada kondisi 50%.</p> <p>Untuk menghindari genangan air dilakukan peninggian badan jalan dan pemadatan secara bertahap. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pola swakelola dengan mengajak masyarakat setempat berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hingga pemeliharaannya.</p> <p>Kegiatan ini mengalami keterlambatan penyelesaian hingga 4 minggu karena faktor cuaca dan kurangnya sarana kerja terutama untuk pemadatan badan jalan.</p>
<p>Pembangunan Jalan rabat beton sepanjang 87 M' Kondisi 50%</p>	
	<p>Keterangan :</p> <p>Pembangunan jalan rabat beton pada kondisi 100%.</p> <p>Jalan ini merupakan salah satu jalan lingkungan di permukiman padat yang selalu dilalui warga sekitarnya.</p> <p>Telah dibentuk kelompok pemelihara prasarana yang telah dibangun, akan tetapi pelaksanaannya belum optimal. Hal ini akan berakibat pada umur bangunan yang tidak akan bertahan lama.</p> <p>Diperlukan sosialisasi terus menerus terkait dengan pentingnya pemeliharaan prasarana agar fungsinya tetap terjaga hingga waktu yang lama.</p>
<p>Pembangunan Jalan rabat beton sepanjang 87 M' Kondisi 100%</p>	

e. Kelurahan Belawan Bahagia

	<p>Keterangan :</p> <p>Kondisi awal jalan jerambah yang sudah tidak layak lagi dilalui. Kondisi ini sangat mengganggu akses transportasi bagi masyarakat. Berdasarkan Usulan kegiatan sesuai PJM pronangkis bahwa kegiatan ini merupakan usulan kegiatan prioritas.</p> <p>Kegiatan ini dikerjakan oleh masyarakat melalui Kelompok swadaya masyarakat dengan nilai BLM sebesar Rp. 66.746.000,- dan tambahan dana dari swadaya masyarakat sebesar Rp. 3.428.000,-</p>
<p>Pembangunan Jalan Jerambah Beton sepanjang 190 M' Kondisi 0%</p>	
	<p>Keterangan :</p> <p>Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan jerambah pada kondisi 50%.</p> <p>Untuk menghindari terjadinya korban dilakukan penguatan bekisting sebelum melakukan pengecoran.</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan dengan pola swakelola dengan mengajak masyarakat setempat berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hingga pemeliharaannya.</p> <p>Kegiatan ini mengalami keterlambatan penyelesaian hingga 6 minggu karena faktor cuaca dan kurangnya sarana kerja terutama untuk pemasangan pondasi..</p>
<p>Pembangunan Jalan Jerambah Beton sepanjang 190 M' Kondisi 50%</p>	
	<p>Keterangan :</p> <p>Pembangunan jalan jerambah beton pada kondisi 100%.</p> <p>Jalan ini merupakan vital di lingkungan permukiman penduduk setempat.</p> <p>Telah dibentuk kelompok pemelihara prasarana yang telah dibangun, akan tetapi pelaksanaannya belum optimal. Hal ini akan berakibat pada umur bangunan yang tidak akan bertahan lama.</p> <p>Diperlukan sosialisasi terus menerus terkait dengan pentingnya pemeliharaan prasarana agar fungsinya tetap terjaga hingga waktu yang lama.</p>
<p>Pembangunan Jalan Jerambah Beton sepanjang 190 M' Kondisi 100%</p>	

f. Kelurahan Belawan Bahari

	<p>Keterangan :</p> <p>Kondisi awal jalan yang selalu tergenang pada saat air laut pasang. Kondisi ini sangat mengganggu akses transportasi bagi masyarakat. Berdasarkan Usulan kegiatan sesuai PJM pronangkis bahwa kegiatan ini merupakan usulan kegiatan prioritas.</p> <p>Kegiatan ini dikerjakan oleh masyarakat melalui Kelompok swadaya masyarakat dengan nilai BLM sebesar Rp. 53.810.000,- dan tambahan dana dari swadaya masyarakat sebesar Rp. 2.074.000,-</p>
<p>Pembangunan Jalan Paving Block Sepanjang 105 M' Kondisi 30%</p>	
	<p>Keterangan :</p> <p>Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan pada kondisi 50%.</p> <p>Untuk menghindari genangan air dilakukan peninggian badan jalan dan pemadatan secara bertahap. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pola swakelola dengan mengajak masyarakat setempat berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hingga pemeliharaannya.</p> <p>Kegiatan ini mengalami keterlambatan penyelesaian hingga 4 minggu karena faktor cuaca dan kurangnya sarana kerja terutama untuk pemadatan badan jalan.</p>
<p>Pembangunan Jalan Paving Block Sepanjang 105 M' Kondisi 50%</p>	
	<p>Keterangan :</p> <p>Pembangunan jalan paving block pada kondisi 100%.</p> <p>Jalan ini merupakan salah satu jalan utama di kelurahan Belawan Bahari yang dilalui oleh mayoritas penduduknya.</p> <p>Telah dibentuk kelompok pemelihara prasarana yang telah dibangun, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Hal ini akan berakibat pada umur bangunan yang tidak akan bertahan lama.</p> <p>Diperlukan sosialisasi terus menerus terkait dengan pentingnya pemeliharaan prasarana agar fungsinya tetap terjaga hingga waktu yang lama.</p>
<p>Pembangunan Jalan Paving Block Sepanjang 105 M' Kondisi 100%</p>	

g. Kelurahan Labuhan Deli

	<p>Keterangan :</p> <p>Kondisi awal jalan yang selalu tergenang pada saat air laut pasang. Kondisi ini sangat mengganggu akses transportasi bagi masyarakat. Berdasarkan Usulan kegiatan sesuai PJM pronangkis bahwa kegiatan ini merupakan usulan kegiatan prioritas.</p> <p>Kegiatan ini dikerjakan oleh masyarakat melalui Kelompok swadaya masyarakat dengan nilai BLM sebesar Rp. 71.250.000,- dan tambahan dana dari swadaya masyarakat sebesar Rp. 8.605.000,-</p>
<p>Pembangunan Jalan Paving Block Sepanjang 250 M' Kondisi 30%</p>	

	<p>Keterangan :</p> <p>Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan pada kondisi 50%.</p> <p>Untuk menghindari genangan air dilakukan peninggian badan jalan dan pemadatan secara bertahap. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pola swakelola dengan mengajak masyarakat setempat berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hingga pemeliharaannya.</p> <p>Kegiatan ini mengalami keterlambatan penyelesaian hingga 5 minggu karena faktor cuaca dan kurangnya sarana kerja terutama untuk pemadatan badan jalan.</p>
<p>Pembangunan Jalan Paving Block Sepanjang 250 M' Kondisi 50%</p>	

	<p>Keterangan :</p> <p>Pembangunan jalan paving block pada kondisi 100%.</p> <p>Jalan ini merupakan salah satu akses jalan yang menghubungkan Kelurahan tetangga yang selalui dilalui oleh masyarakat dua kelurahan tersebut.</p> <p>Telah dibentuk kelompok pemelihara prasarana yang dibangun, tetapi belum optimal. Hal ini akan berakibat pada umur bangunan yang tidak akan bertahan lama.</p> <p>Diperlukan sosialisasi terus menerus terkait dengan pentingnya pemeliharaan prasarana agar fungsinya tetap terjaga hingga waktu yang lama.</p>
<p>Pembangunan Jalan Paving Block Sepanjang 250 M' Kondisi 100%</p>	

h. Kelurahan Sei Mati

	<p>Keterangan :</p> <p>Kondisi awal jalan yang selalu tergenang pada saat air laut pasang. Kondisi ini sangat mengganggu akses transportasi bagi masyarakat. Berdasarkan Usulan kegiatan sesuai PJM pronangkis bahwa kegiatan ini merupakan usulan kegiatan prioritas.</p> <p>Kegiatan ini dikerjakan oleh masyarakat melalui Kelompok swadaya masyarakat dengan nilai BLM sebesar Rp. 71.250.000,- dan tambahan dana dari swadaya masyarakat sebesar Rp. 5.335.000,-</p>
<p>Pembangunan Jalan Paving Block Sepanjang 200 M' Kondisi 30%</p>	
	<p>Keterangan :</p> <p>Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan pada kondisi 50%.</p> <p>Untuk menghindari genangan air dilakukan peninggian badan jalan dan pemadatan secara bertahap. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pola swakelola dengan mengajak masyarakat setempat berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hingga pemeliharaannya.</p> <p>Kegiatan ini mengalami keterlambatan penyelesaian hingga 3 minggu karena faktor cuaca dan kurangnya sarana kerja terutama untuk pemadatan badan jalan.</p>
<p>Pembangunan Jalan Paving Block Sepanjang 200 M' Kondisi 50%</p>	
	<p>Keterangan :</p> <p>Pembangunan jalan paving block pada kondisi 100%.</p> <p>Jalan ini merupakan jalan lingkungan yang menuju ke jalan utama kelurahan..</p> <p>Telah dibentuk kelompok pemelihara prasarana yang dibangun, tetapi belum optimal pelaksanaannya. Hal ini akan berakibat pada umur bangunan yang tidak akan bertahan lama.</p> <p>Diperlukan sosialisasi terus menerus terkait dengan pentingnya pemeliharaan prasarana agar fungsinya tetap terjaga hingga waktu yang lama.</p>
<p>Pembangunan Jalan Paving Block Sepanjang 200 M' Kondisi 100%</p>	